**STANDAR MUTU**

**INSTITUT AGAMA ISLAM ( IAI )**

**MIFTAHUL ULUM** **TANJUNGPINANG**

****

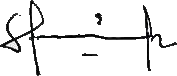
## PENYUSUN

KELOMPOK KERJA PENYUSUNAN DOKUMEN MUTU IAI MIFTAHUL ULUM

STANDAR MUTU

# SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL (SPMI) INSTITUT AGAMA ISLAM ( IAI ) MIFTAHUL ULUM

**TANJUNGPINANG**



Dirumuskan oleh

: Tim Pusat Pengembangan

Standar Mutu IAI- MU

Ketua

Diperiksa dan dikendalikan oleh

: Ketua LPM IAI-MU

**SUHARDIMAN,M.Pd.I**

NIDN 2128087201

Ketua:

**DR. SARIPUDDIN,M.Pd.I**

NIDN:2107107701

Tanjungpinang, 1 Juni 2024

Ditetapkan oleh:

Rektor

**Dra. Hj Mardiah, MM**

NIDK

# KATA PENGANTAR

Segala puji hanya milik Allah SWT yang telah memberikan kita nikmat Iman dan Islam, serta kekuatan lahir dan batin, sehingga buku penyusunan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Institut Agama Islam ( IAI ) Miftahul Ulum Tanjungpinang ini dapat diselesaikan. SPMI ini mengacu pada peraturan yang tertuang dalam Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Peraturan Pemerintah No 17 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan pendidikan, Undang-Undang No. 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 08 tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI), Peraturan Menteri Pendidikan Riset dan Teknologi No. 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi, dan Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2023 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.

Mengacu pada beberapa peraturan tersebut, intinya bahwa penyelenggaraan pendidikan tinggi di Indonesia harus berbasis mutu. Berkakaitan dengan hal tersebut, maka SPMI ini disusun dengan tujuan bisa menjadi rujukan dalam proses penjaminan mutu seluruh rangkaian penyelenggaraan pendidikan di IAI-MU Tanjungpinang. Di samping itu, SPMI ini diharapkan juga dapat mendukung upaya- upaya peningkatan dan pengembangan yang telah dicanangkan oleh IAI-MU Tanjungpinang untuk menuju Kampus sebagai Tempat Kajian Islam yang unggul.

Dokumen SPMI ini terdiri dari lima komponen utama, yaitu Kebijakan Mutu IAI-MU Tanjungpinang, Standar Mutu IAI-MU Tanjungpinang, Manual Mutu IAI-MU Tanjungpinang, Standart Operating Prosedure Mutu IAI-MU Tanjungpinang dan Formulir Mutu IAI-MU Tanjungpinang. Keseluruhan dokumen tersebut merupakan satu kesatuan yang utuh, yang dijadikan sebagai pijakan dalam proses penjaminan mutu secara internal di IAI-MU Tanjungpinang.

Akhirnya, kami mengucapkan terimakasih yang tidak terhingga kepada Lembaga Penjaminan Mutu (LPM) IAIMU Tanjungpinang dan semua pihak yang telah membantu penyusunan dan penerbitan dokumen SPMI ini. Segala saran dan kritik yang membangun sangat kami harapkan demi perbaikan SPMI ini pada edisi yang akan datang. Semoga Allah SWT senantiasa melimpahkan rahmat dan ridha- Nya atas amal dan usaha kita. Amin.

Tanjungpinang, 1 Juni 2024

Rektor

**Dra. Hj Mardiah, MM**

NIDK

# DAFTAR ISI

[KATA PENGANTAR ii](#_bookmark0)

[DAFTAR ISI](#_bookmark1) [iv](#_bookmark1)

BAB I PENGERTIAN DAN RUANG LINGKUP

STANDAR MUTU IAI-MU 1

* 1. Latar Belakang 1
  2. Komponen Standar Mutu IAI-MU 2
  3. [Pelaksanaan Standar Mutu 3](#_bookmark4)
  4. Strategi Pemenuhan Standar IAI-MU 4
  5. Pemantauan Standar Mutu IAI-MU 5
  6. Perbaikan Standar Mutu IAI-MU 5

[BAB II STANDAR IDENTITAS 7](#_bookmark0)

* 1. Pengertian dan Ruang Lingkup 7
  2. Visi, Misi, Tujuan dan Nilai-nilai Dasar 7
  3. [Standar Mutu dan Indikator 8](#_bookmark0)

[BAB III STANDAR PENDIDIKAN 10](#_bookmark0)

* 1. Standar Kompetensi Lulusan 10
  2. Standar Isi 12
  3. [Standar Proses Pembelajaran 14](#_bookmark0)
  4. Standar Penilaian Pendidikan 17
  5. [Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan 18](#_bookmark5)
  6. Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran 21
  7. Standar Pengelolaan Pembelajaran 25
  8. Standar Pembiayaan Pembelajaran 26

[BAB IV STANDAR PENELITIAN 29](#_bookmark0)

* 1. Standar Hasil Penelitian 29
  2. Standar Isi Penelitian 31
  3. Standar Proses Penelitian 32
  4. [Standar Penilaian Penelitian 33](#_bookmark3)
  5. Standar Peneliti 34
  6. Standar Sarana dan Prasarana Penelitian 35
  7. [Standar Pengelolaan Penelitian 36](#_bookmark6)
  8. [Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian 37](#_bookmark7)

BAB V STANDAR PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT 39

* 1. [Standar Hasil Pengabdian Masyarakat 39](#_bookmark8)
  2. [Standar Isi Pengabdian Kepada Masyarakat 40](#_bookmark9)
  3. Standar Proses Pengabdian Kepada Masyarakat 41
  4. Standar Penilaian Pengabdian Kepada Masyarakat 41
  5. Standar Pelaksana Pengabdian Kepada Masyarakat 43
  6. [Standar Sarana dan Prasarana Pengabdian kepada Masyarakat 44](#_bookmark0)
  7. Standar Pengelolaan Pengabdian kepada Masyarakat 44
  8. [Standar Pendanaan dan Pembiayaan Pengabdian kepada Masyarakat 46](#_bookmark10)

BAB VI STANDAR MAHASISWA DAN 48

PENGELOLAAN ALUMNI 48

* 1. Pengertian dan Ruang Lingkup 48
  2. [Landasan Ideal 48](#_bookmark11)
  3. [Standar Mutu dan Indikator 49](#_bookmark12)

[BAB VII STANDAR PENGELOLAAN 52](#_bookmark0)

* 1. Pengertian dan Ruang Lingkup 52
  2. [Landasan Ideal 52](#_bookmark13)
  3. [Standar Mutu dan Indikator 53](#_bookmark2)

BAB VIII STANDAR SISTEM INFORMASI 55

* 1. Pengertian dan Ruang Lingkup 55
  2. [Landasan Ideal 55](#_bookmark14)
  3. [Standar Mutu dan Indikator 55](#_bookmark15)

BAB XV PENUTUP 57

**BAB I**

**PENGERTIAN DAN RUANG LINGKUP STANDAR MUTU IAI-MU**

* 1. **Latar Belakang**

Pemerintah menyelenggarakan sistem penjaminan mutu pendidikan tinggi untuk mendapatkan pendidikan bermutu. Dalam Pasal 52 UU RI No. 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi merupakan kegiatan sistemik untuk meningkatkan mutu pendidikan tinggi secara berencana dan berkelanjutan. Penjaminan mutu sebagaimana dimaksud dilakukan melalui penetapan, pelaksanaan, evaluasi, pengendalian, dan peningkatan standar pendidikan tinggi.

Secara umum yang dimaksud dengan penjaminan mutu adalah proses penetapan dan pemenuhan standar pengelolaan dan proses secara konsisten dan berkelanjutan sehingga konsumen, produsen, dan pihak lain yang berkepentingan memperoleh kepuasan. Dengan demikian, penjaminan mutu perguruan tinggi adalah proses penetapan dan pemenuhan standar pengelolaan pendidikan tinggi secara konsisten, dan berkelanjutan, sehingga *stakeholders* memperoleh kepuasan.

Pasal 54 UU RI No. 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, menyatakan bahwa standar pendidikan tinggi terdiri atas: 1) standar nasional pendidikan tinggi yang ditetapkan oleh menteri atas usul suatu badan yang bertugas menyusun dan mengembangkan Standar Nasional Pendidikan Tinggi; dan 2) standar pendidikan tinggi yang ditetapkan oleh setiap perguruan tinggi dengan mengacu pada Standar Nasional Pendidikan Tinggi.

Perguruan tinggi memiliki keleluasaan mengatur pemenuhan Standar Nasional Pendidikan Tinggi yang pelaksanaannya dievaluasi secara berkala. Terkait dengan itu, IAI-MU Tanjungpinang menetapkan standar pendidikan tinggi untuk setiap satuan pendidikan. Pemilihan dan penetapan standar itu dilakukan dalam sejumlah aspek yang disebut butir-butir mutu. Standar mutu dibutuhkan IAI-MU Tanjungpinang dalam kaitan:

* + 1. Sebagai acuan dasar dalam rangka mewujudkan visi dan menjalankan misi IAI-MU Tanjungpinang ;
    2. Sebagai instrumen untuk memacu IAI-MU Tanjungpinang. agar dapat

meningkatkan

kinerjanya dalam memberikan layanan yang bermutu;

* + 1. Sebagai perangkat untuk mendorong terwujudnya transparansi dan akuntabilitas publik dalam penyelenggaraan tugas pokoknya;
    2. Sebagai kompetensi/ kualitas minimum bagi lulusan IAI-MU Tanjungpinang,

yang dapat diukur dan diuraikan menjadi parameter dan indikator.

Standar mutu IAI-MU Tanjungpinang dirumuskan dan ditetapkan dengan mengacu pada visi perguruan tinggi (secara deduktif) dan kebutuhan *stakeholders* (secara induktif). Standar mutu dirumuskan secara spesifik dan terukur, yaitu mengandung unsur ABCD *(Audience, Behavior, Competence, Degree).* Standar mutu ini akan menjadi acuan dalam proses pelaksanaan tugas dan pengelolaan IAI-MU Tanjungpinang sebagai sebuah institusi perguruan tinggi. Dengan demikian, pengembangan standar mutu dilakukan berulang kali, dan terus ditingkatkan secara berkelanjutan sejalan dengan peningkatan capaian pada standar mutu tersebut. Secara rinci, mekanisme penetapan, pelaksanaan dan pemenuhan standar, serta pengendalian dan pengembangan standar diuraikan pada buku Standar Operastional Procedure IAI-MU Tanjungpinang.

* 1. **Komponen Standar Mutu IAI-MU Tanjungpinang**

Standar mutu ditetapkan IAI-MU Tanjungpinang dengan berpedoman pada UU No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (SPN) Bab IX Pasal 35 dan Permenristek Dikti No 44 tahun 2015 tentang SNPT. Standar mutu yang ditetapkan merupakan hasil mutu kumulatif dari semua kegiatan yang terencana, yang meliputi unsur masukan, proses dan keluaran dari sistem pendidikan. Standar mutu pada Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi di IAI-MU Tanjungpinang mencakup komponen-komponen yang menggambarkan tingkat efektivitas dan efisiensi pengelolaan pendidikan tinggi yang bermutu. Komponen standar mutu yang

dimaksud adalah:

* + 1. Standar Standar Pendidikan, yang terdiri atas:
       1. Standar Kompetensi Lulusan;
       2. Standar Isi;
       3. Standar Proses Pembelajaran;
       4. Standar Penilaian Pembelajaran;
       5. Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan
       6. Standars Sarana dan Prasarana Pembelajaran
       7. Standar Pengelolaan
       8. Standar Pembiayaan Pembelajaran
    2. Standar Penelitian, yang terdiri dari:
       1. Standar Hasil Penelitian;
       2. Standar Isi Penelitian;
       3. Standar Proses Penelitian;
       4. Standar Penilaian Penelitian;
       5. Standar Peneliti
       6. Standars Sarana dan Prasarana
       7. Standar Pengelolaan Penelitian
       8. Standar Pembiayaan

3 .Standar Pengabdian kepada Masyarakat, yang terdiri dari:

1. Standar Hasil Pengabdian Masyarakat;
2. Standar Isi Pengabdian Masyarakat;
3. Standar Proses Pengabdian Masyarakat;
4. Standar Penilaian Pengabdian Masyarakat;
5. Standar Pelaksana Pengabdian Masyarakat;
6. Standars Sarana dan Prasarana Pengabdian Masyarakat;
7. Standar Pengelolaan Pengabdian Masyarakat;
8. Standar Pembiayaan Pengabdian Masyarakat;
9. Standar Mahasiswa dan Pengelolaan Alumni;
10. Standar Pengelolaan Pendidikan;
11. Standar Sistem Informasi.

Semua standar tersebut harus terus diupayakan agar berada pada kondisi sebaik mungkin untuk mencapai mutu terbaik, sekaligus mencerminkan mutu IAI-MU Tanjungpinang upaya peningkatan kinerja dan mutu dilakukan terhadap hasil pelaksanaan dan pencapaian standar tersebut di atas.

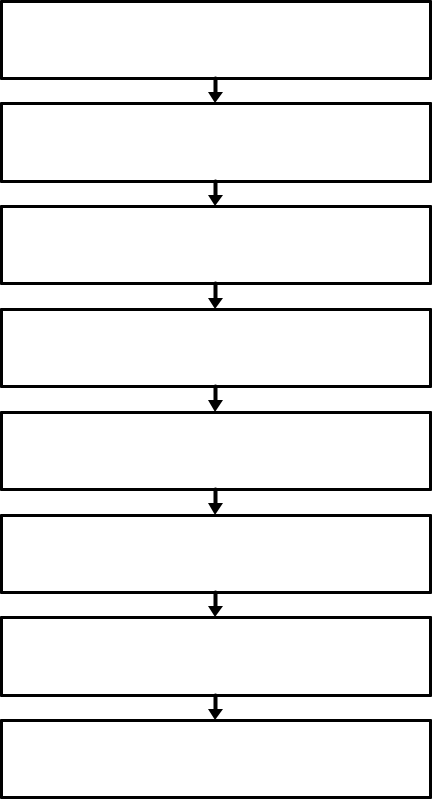
## Pelaksanaan Standar Mutu

Keberhasilan pelaksanaan jaminan mutu berbagai aspek pendidikan sangat dipengaruhi oleh kultur/budaya kerja dan *mindset* kesadaran mutu semua dosen, karyawan dan mahasiswa di IAI-MU Tanjungpinang. Untuk itu, sangat diperlukan kepemimpinan yang kuat dan inisiatif manajemen dalam proses penyadaran dan perubahan kultur serta etos kerja secara berkesinambungan melalui sosialisasi, lokakarya, penerbitan pedoman pelaksanaan dan bimbingan kendali mutu yang dikembangkan mulai dari tingkat Institusi hingga tingkat jurusan/program studi sehingga tercipta suasana akademik yang diharapkan.

Standar mutu yang telah ditetapkan di tingkat institut kemudian disampaikan ke unit-unit yang terkait. Untuk masing-masing standar mutu yang akan dicapai, unit-

unit pelaksana seperti , Jurusan, Program Studi, Biro, dan Pusat Layanan membuat rencana kegiatan, baik yang rutin maupun pengembangan. Untuk masing-masing kegiatan ditetapkan juga target-target pencapaiannya.

Langkah selanjutnya dalam pelaksanaan standar mutu adalah penetapan prosedur, persiapan, pelaksanaan serta sumber daya yang dibutuhkan untuk setiap kegiatan yang dirancang dalam upaya pencapaian mutu. Penyiapan sumber daya pelaksana perlu disiapkan melalui proses pelatihan, lokakarya dan diskusi-diskusi. Dengan bekal persiapan-persiapan ini diharapkan pelaksanaan 28 Komponen Standar Mutu IAI-MU Tanjungpinang dapat berjalan seperti yang diharapkan. Adapun implementasi program dan kegiatan peningkatan mutu untuk mencapai visi dan menjalankan misi IAI-MU Tanjungpinang dapat dilihat dalam bentuk gambar sebagai berikut:



**VISI**

**MISI**

**TUJUAN**

**RENSTRA**

**KEBIJAKAN AKADEMIK**

**STANDAR AKADEMIK**

**STANDAR MUTU**

**PROGRAM KERJA**

Gambar 1: Implementasi Program dan Kegiatan Peningkatan Mutu dalam Mencapai Visi dan Menjalankan Misi di IAI-MU Tanjungpinang

* 1. **Strategi Pemenuhan Standar IAI-MU Tanjungpinang**

Dalam rangka memenuhi standar lulusan IAI-MU Tanjungpinang, upaya yang dapat dilakukan adalah:

* + 1. Rektor , wakil rektor , Ketua Jurusan/Ketua Program Studi perlu membangun komunikasi internal dan eksternal dengan membuat jaringan komunikasi di tingkat alumni, masyarakat profesi, pemerintah dan dunia usaha.
    2. Meningkatkan kualifikasi akademik dosen dan tenaga kependidikan.
    3. Menyelenggarakan pelatihan yang berkaitan dengan peningkatan mutu dosen dalam proses pembelajaran, penelitian dan pengabdian pada masyarakat.
    4. Menyelenggarakan pelatihan yang berkaitan dengan peningkatan mutu tenaga kependidikan dalam memberikan pelayanan adminstratif.
  1. **Pemantauan Standar** Mutu IAI-MU Tanjungpinang

Pada suatu sistem penjamin mutu, pemantauan merupakan langkah esensial untuk menilai keberhasilan sistem secara keseluruhan. Pada prinsipnya, pemantauan sistem adalah upaya agar suatu sistem bisa diterapkan sesuai dengan apa yang direncanakan dengan mengakomodasi masalah-masalah implementasi, mencarisolusi penyelesaian masalah yang tepat dan mengarah pada perbaikan berkelanjutan.

Pemantauan ini meliputi pengamatan secara berkala pada identifikasi faktor- faktor penghambat dan pendukung, menentukan tindakan-tindakan koreksi yang dibutuhkan, dan apabila diperlukan bisa mengarah pada suatu pengkajian ulang tentang sistem penjaminan mutu yang sedang berlaku. Untuk kebutuhan ini pada tahap perencanaan, telah disediakan pula prosedur pemantauan, evaluasi dan perbaikan.

## Perbaikan Standar Mutu IAI-MU Tanjungpinang

Selain dari langkah pemantauan yang memang harus dilakukan, proses penjaminan mutu menuntut adanya suatu proses perbaikan yang didahului oleh proses evaluasi diri yang perlu dilakukan secara berkala. Evaluasi diri ini dimaksudkan untuk mengkaji kembali faktor-faktor yang terkait dengan perbaikan berkelanjutan yang menentukan keberhasilan dari sistem penjaminan mutu yang dilakukan secara operasional. Proses perbaikan mutu akan melibatkan langkah- langkah sistematis sebagai berikut:

* + 1. *Identifikasi masalah.* Langkah ini menentukan kegiatan yang akan dievaluasi, sasaran yang diharapkan, jadwal kegiatan, mendefinisikan dengan rinci apa yang dikerjakan, langkah-langkah yang perlu dilakukan, cara pemantauan dan evaluasi yang terfokus dan dapat dikerjakan;
    2. *Menentukan status saat ini dari kegiatan yang diamati.* Langkah ini dilakukan melalui Evaluasi Diri dan ditujukan untuk mempelajari masalah yang ada dan untuk memperoleh data yang terkait dengan masalah yang dikaji;
    3. *Mengkaji masalah secara mendalam dan menentukan penyebab serta langkah- langkah koreksi yang mungkin perlu dilakukan.* Pada langkah ini alat bantu seperti diagram sebab-akibat (*cause and affect diagram*) dan sebagaimana bisa digunakan untuk mencari penyebab kegagalan, serta kemungkinan- kemungkinan yang bisa dilakukan untuk perbaikan. Diskusi dengan pihak-pihak lain yang terlibat dalam penjaminan mutu bisa dilakukan untuk meluaskan kemungkinan-kemungkinan perbaikan;
    4. *Melakukan perbaikan.* Perbaikan ditujukan untuk mengembalikan kegiatan sesuai dengan yang direncanakan;
    5. *Memantau hasil perbaikan.* Pemantauan dilakukan dengan cara membandingkan hasil dengan apa yang direncanakan. Hasil komparasi yang diperoleh bisa digunakan untuk melihat apakah koreksi yang dilakukan sudah berhasil mengembalikan kegiatan sesuai dengan apa yang diinginkan, atauharus dicari suatu penyelesaian yang lebih baik;
    6. *Implementasi perbaikan.* Pada saat solusi yang diajukan sudah berhasil menyelesaikan masalah yang ada, maka langkah yang sudah diambil dapat dijadikan standar untuk digunakan kemudian hari.

## Referensi

Referensi yang digunakan sebagai rujukan dalam penyusunan standard mutu IAI-MU Tanjungpinang adalah:

* + 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pemdidikan Nasional;
    2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor: 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
    3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
    4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
    5. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi;
    6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia;
    7. Permendikbud Nomor 73 tahun 2013 tentang Petunjuk Pelaksanaan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia;
    8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
    9. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
    10. Permenristekdikti Noor 44 tahun 2015 tentang Standar Nasional Perguruan Tinggi.
    11. STATUTA IAI-Miftahul Ulum Tanjungpinang

# BAB II STANDAR IDENTITAS

* 1. **Pengertian dan Ruang Lingkup**

Identitas merupakan jati diri atau sekumpulan unsur yang secara bersamaan dapat mencitrakan tentang siapa dan atau apa IAI-MU Tanjungpinang . Identitas ini mencakup nama, logo, alamat, visi, misi, dan lain -lain yang menunjukkan jati diri, karakteristik esensial dan khas yang melekat pada lembaga serta membedakannya dari Institusi lain. Karakteristik ini dapat berupa sesuatu yang bersifat administratif seperti nama, logo atau lambang, alamat dan lain-lain. Karakteristik juga dapat bersifat substansial seperti nilai-nilai *(values)* organisasi, visi, misi, dan tujuan. Karakteristik substansial bahkan mencakup keunggulan akademik dan ilmiah yang dimiliki.

Standar Identitas IAI-MU Tanjungpinang sedikitnya harus mencakup perumusan dan penetapan: visi, misi, tujuan, statuta, dan nilai dasar. kelima hal tersebut, secara resmi ditetapkan dan didokumentasikan oleh pengelola IAI-MU Tanjungpinang. Mekanisme perumusan dan penetapan standar identitas dilaksanakan sesuai dengan ketentuan pada Manual Sistem Penjaminan Mutu tentang perumusan dan penetapan standar. Khusus untuk standar identitas, pelibatan seluruh komponen sivitas akademika, dan *stakeholder* eksternal dalam perumusan dan penyusunan standar ini merupakan hal yang krusial dan wajib dipenuhi.

* 1. **Visi, Misi, Tujuan dan Nilai-nilai Dasar**

**Visi**

Menjadi Institut Agma Islam Mitahul Ulum Tanjungpinang Lembaga Pendidikan Tinggi yang melahirkan sarjana muslim yang beriman, bertaqwa,dan berakhlak mulia, serta menguasai Ilmu pengetahuan dan Teknologi menuju tahun 2035

**Misi**

1. Menghasilkan sarjana yang memahami Islam secara kaffah
2. Memberikan landasan moral terhadap pengembangan iptek melalui pengkajian dan penelitian.
3. Meningkatkan Professionalisme Dosen dalam rangka peningkatan kualitas pendidikan.
4. Mendidik mahasiswa menjadi anggota masyarakat yang bermoral, berkemantapan akidah dan kedalaman spiritual.
5. Menyiapkan sumberdaya manusia serta sarana dan prasarana untuk menunjang kelancaran pelaksanaan TRIDHARMA Perguruan Tinggi

## Tujuan

1. Menghasilkan lulusan yang berakhlak mulia menjadi anggota masyarakat yang memilki kemampuan, keunggulan akademik, profesional yang dapat menerapkan, mengembangkan ilmu agama Islam, teknologi, seni dan ilmu lain.
2. Menggali, mengembangkan dan menyebarluaskan ilmu agama Islam, dan ilmu lain yang terkait serta mengupayakan penggunaannya untuk meningkatkan martabat dan taraf kehidupan masyarakat serta memperkaya kebudayaan nasional.
3. Memberi kontribusi kepada masyarakat dalam pengembangan lembaga pendidikan formal, informal, dan nonformal berbasis integrasi ilmu, teknologi, dan seni dengan Islam.
4. Mewujudkan kelembagaan yang efektif dalam merealisasikan visi dan melaksanakan misi

## Strategi

* 1. Peningkatan mutu lulusan yang beriman,bertakw,berakhlak melalui integrasi pembelajaran ke Islaman
  2. Pengembangan metode dan proses pembelajaran dengan pendekatan SCL,penggunaan kurikulum berbasis KKNI serta penguatan kecakapan hidup
  3. Peningkatan komptensi lulusan dalam bahasa melalui program sertifkasi komptensi serta pemanfatan teknologi informasi melalui berbagai pelatihan
  4. Peningkatan dan penyempurnaan sitem penjaminan mutu,kurikulum,pembelajaran,layanan mahasiswa,dan suasana akademik secara berkelanjutan untuk memenuhi dan melampaui standar mutu pendidikan dengan berbagai kebijakan akademik yang berorientasi pada perguruan tinggi berbasis riset
  5. Peningkatan program integrasi penelitian dan pengabdian masyarakat

## Tata Nilai

1. Pengembangan berbagai cabang ilmu pengetahuan dengan pendekatan religi sehingga nilai-nilai Islam menjadi roh bagi setiap cabang ilmu pengetahuan
2. Pengembangan paradigma ilmu yang memberikan penekanan pada rasa iman dan tuhid (beliefeaffection)
3. Penyelenggaran beberapa disiplin Ilmu untuk mencapai standar kompetensi ilmu-Ilmu keislaman yang memperkuat domain akidah, ibadah dan muamalah Islamiyah, dan penerapan prinsisp Islam dalam Disiplin Ilmu (IDI) sebagai upaya riil mewujudkan integritas ilmu dengan Islam

## Standar Mutu dan Indikator

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **No** | **Standar Identitas** | **Indikator** |
| 1 | Setiap jurusan/prodi memiliki visi, misi, tujuan dan sasaran yang dirumuskan secara jelas dan realistik serta mengacu pada visi IAI-MU | 1. Jurusan/Program studi memiliki dokumen/bukti bahwa rumusan visi, misi, tujuan dan sasaran disusun secara jelas sesuai dengan visi, misi, tujuan dan sasaran fakultas dan institut, serta berdasarkan pada hasil kesepakatan yang dipahami oleh pemangku kepentingan. 2. Rumusan visi, misi, tujuan dan sasaran jurusan/program studi ditetapkan dalam rentang waktu tertentu, dievaluasi secara periodik, dan terdokumentasi dalam buku Pedomnan Akademik , buku   kurikulum dan profil prodi , dokumen rencana strategi pengembangan fakultas, dokumen rencana operasional/rencana  kegiatan dan anggaran tahunan. |
| 2 | Jurusan/Prodi menetapkan sasaran mutu secara jelas | 1. Jurusan/Program studi menetapkan kebijakan mutu dan sasaran mutu yang selaras dengan kebijakan mutu dan sasaran mutu institut, serta mengacu pada standar   akademik yang ditetapkan; |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **No** | **Standar Identitas** | **Indikator** |
|  |  | 1. Jurusan/Program studi menetapkan sasaran mutu dalam rentang waktu tertentu dan diukur status pencapaiannya setiap tahun. 2. Jurusan/Program studi mendokumentasikan sasaran mutu dalam dokumen Rencana Strategis Pengembangan instuisi dan Rencana Operasional/Rencana Kegiatan dan Anggaran Tahunan, dan dokumen penjaminan mutu institusi. |

# BAB III STANDAR PENDIDIKAN

Di era Globalisasi dan Informasi teknologi sangat cepat berkembang disemua sektor tidak terkecuali pada dunia pendidikan tinggi di Indonesia dituntut untuk mampu bersaing secara Nasional maupun Internasional. Untuk itu diperlukan kualitas dari setiap perguruan tinggi untuk mampu melakukan peningkatan sistem pendidikan tinggi secara berkesinambungan. Sistem pendidikan tinggi di IAI- Miftahul Ulum Tanjungpinang melalui peningkatan tridarma perguruan tinggi, terutama di bidang pendidikan, untuk menjamin peningkatan kualitas professionalitas. Untuk itu diperlukan standar pendidikan yang mampu mengakomodir kebutuhan dari stakeholders. Standar ini dilakukan sebagai evaluasi, pengembangan secara periodik guna meningkatkan kualitas berdasarkan permintaan stakeholders yang bertujuan untuk memenuhi permintaan pasar kerja serta dapat mempersiapkan lulusan dalam menciptakan lapangan pekerjaan ataupun studi lanjut

## 1 Standar Kompetensi Lulusan

**a. Pengertian dan Ruang Lingkup**

Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan Pasal 26 ayat 4 menyatakan bahwa standar kompetensi lulusan pada jenjang pendidikan tinggi bertujuan untuk mempersiapkan peserta didik menjadi anggota masyarakat yang berakhlak mulia, memiliki pengetahuan, keterampilan, kemandirian, dan sikap untuk menemukan, mengembangkan, serta menerapkan ilmu, teknologi, dan seni, yang bermanfaat bagi kemanusiaan. Pada Pasal 27, dinyatakan bahwa standar kompetensi lulusan pendidikan tinggi ditetapkan oleh masing-masing perguruan tinggi.

Selanjutnya, dengan mengacu pada Permenristekdikti No. 3 tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi pasal 5 ayat (1) disebutkan bahwa standar kompetensi lulusan merupakan kriteria minimal tentang kualifikasi kemampuan lulusan yang mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan yang dinyatakan dalam rumusan capaian pembelajaran lulusan. Pada ayat (2) disebutkan bahwa standar kompetensi lulusan yang dinyatakan dalam rumusan capaian pembelajaran lulusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai acuan utama pengembangan standar isi pembelajaran, standar proses pembelajaran, standar penilaian pembelajaran, standar dosen dan tenaga kependidikan, standar sarana dan prasarana pembelajaran, standar pengelolaan pembelajaran, dan standar pembiayaan pembelajaran. Selanjutnya dalam ayat

(3) dirinci bahwa rumusan capaian pembelajaran lulusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib: (a). mengacu pada deskripsi capaian pembelajaran lulusan KKNI; dan (b). memiliki kesetaraan dengan jenjang kualifikasi pada KKNI.

## b. Landasan Ideal

Berdasarkan pengertian dan ruang lingkup kompetensi seperti yang dijelaskan sebelumnya, maka :

1. Setiap Program Studi harus merumuskan standar mutu dan kompetensi lulusan berdasarkan spesifikasi/identitas Program Studi dan rumusan kompetensi yang telah ditetapkan dengan mangacu pada KKNI;
2. Standar mutu lulusan harus dapat dicapai melalui implementasi kurikulum berbasis kompetensi yang mengacu pada KKNI dan telah ditetapkan, serta penciptaan atmosfir akademik yang kondusif.

## c. Standar Mutu dan Indikator

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **NO** | **Standar Komptensi Lulusan** | **Indikator** |
| 1 | Kualifikasi sarjana S1 | Transkrip Nilai dengan IPK 2-4, Ijazah dan SKPI |
| 2 | Program studi menghasilkan lulusan bermutu baik sesuai dengan KKNI | 1. Rata-rata indeks prestasi kumulatif (IPK) minimal 2,75 2. Rata-rata masa studi maksimal 10   semester   1. Persentase lulusan tepat waktu lebih dari 50% 2. Rata-reata masa tunggu kerja pertama dari lulusan kurang dari 6 bulan 3. Kesesuaian bidang kerja dari lulusan dengan bidang studi lebih dari 50% 4. Lulusan   mememiliki kemampuan teknologi informasi dan komunikasi   1. Lulusan memiliki integritas moral,etika dan profesionalisme,sert a mampu   bekerjasama dalam TIM |

* 1. **Standar Isi**

## Pengertian dan Ruang Lingkup

Standar Isi adalah standar tentang kurikulum yang diberlakukan oleh suatu penyelenggara pendidikan. Ruang lingkup standar isi juga mencakup materi dan kompetensi sehingga standar isi sangat erat berkaitan dengan standar- standar lain seperti Standar Proses Pembelajaran, Standar Kompetensi Lulusan, Standar Penilaian, Standar Atmosfir Akademik, dan lain-lain.

Kurikulum pendidikan tinggi seperti yang tercantum pada UU No. 12 tahun 2012 pasal 35 ayat (1) tentang Pendidikan Tinggi, merupakan seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan ajar serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tinggi. Dalam ayat (2) dinyatakan bahwa Kurikulum Pendidikan Tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikembangkan oleh setiap perguruan tinggi dengan mengacu pada Standar Nasional Pendidikan Tinggi untuk setiap program studi yang mencakup pengembangan kecerdasan intelektual, akhlak mulia, dan keterampilan.

Standar Isi merupakan Standar wajib berdasarkan PP No. 19/2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan, Pasal 5, 9, 15, 17 ayat 4, dan 18. Selain itu, Landasan penyusunan Standar Isi adalah Keputusan Mendiknas No. 232/U/2000 Tentang Pedoman Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi dan Penilaian Hasil Belajar Mahasiswa dan Keputusan Mendiknas No. 045/U/2002 Tentang Kurikulum Inti Pendidikan Tinggi.

Selanjutnya, jika mengacu pada Permenristek Dikti No. 44 tahun 2015 tentang SNPT pasal 8 ayat (1) dan (2) disebutkan bahwa Standar isi pembelajaran merupakan kriteria minimal tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran, dimana kedalaman dan keluasan materi pembelajaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu pada capaian pembelajaran lulusan. Lebih lanjut, dijelaskan dalam pasal 9 bahwa tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) untuk setiap program pendidikan, dirumuskan dengan mengacu pada deskripsi capaian pembelajaran lulusan dari KKNI.

## Landasan Ideal

Secara berjenjang, tujuan pembelajaran yang diselenggarakan harus mengacu pada tujuan IAI-Miftahul Ulum Tanjungpinang yang telah dirumuskan dan ditetapkan (sebagaimana terdapat pada Standar Identitas) dengan memperhatikan keunggulan akademik. Oleh karena itu, penting artinya tujuan pembelajaran ini dirumuskan secara cermat dan berjenjang mulai dari tingkat Institut hingga dipetakan pada tujuan pembelajaran kurikulum jurusan/program studi dan kompetensi setiap materi pada setiap matakuliah.

Kriteria Standar Isi IAI-Miftahul Ulum Tanjungpinang harus sesuaikriteria yang ditetapkan Standar Nasional Pendidikan. Kriteria Standar Isi program studi di lingkungan IAI-Miftahul Ulum Tanjungpinang harus menunjukkan dan memiliki :

1. Kesesuaian kurikulum dengan visi dan misi program studi;
2. Matrik/Peta kurikulum;
3. Urutan materi pembelajaran dalam matrik/peta kurikulum;
4. Urutan pelaksanaan kegiatan pembelajaran dalam kurikulum dibandingkan dengan matrik/peta kurikulum;
5. Kesesuaian keahlian dan pendidikan dosen dengan materi pembelajaran yang diajarkan;
6. Mekanisme yang efektif untuk menjamin relevansi kurikulum.

## Standar Mutu dan Indikator

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **No** | **Standar Isi Pembelajaran** | **Indikator** |
| 1 | Program studi memiliki dokumen kurikulum yang dimutahirkan secara periodik dan beriorientasi ke depan sesuai dengan visi, misi, tujuan dan sasaran program studi | 1. Kurikulum memuat jabaran kompetensi lulusan secara lengkap (kompetensi utama, kompetensi pendukung, dan kompetensi lain), serta berorientasi ke depan sesuai dengan visi, misi, tujuan dan sasaran program studi. 2. Kurikulum mencantumkan   matriks/peta kurikulum (standar kompetensi versus mata kuliah)   1. Seluruh mata kuliah (kuliah dan praktikum) dilengkapi dengan silabus mata kuliah yang selalu dimutahirkan. 2. Program studi melakukan peninjauan kurikulum minimal 4 tahun sekali dengan melibatkan/ mempertimbangkan masukan dari pemangku kepentingan internal dan eksternal, serta dimutahirkan dengan perkembangan keilmuan dan   teknologi di bidangnya. |
| 2 | Legalitas dan kualitas jurusan/Program Studi | Setiap jurusan/program studi memiliki kurikulum yang ditetapkan dengan SK Rektor dan memiliki status akreditasi yang ditetapkan oleh BAN-PT atau LAM-PT |

## Standar Proses Pembelajaran

* + 1. **Pengertian dan Ruang Lingkup**

Standar Proses Pembelajaran IAI-Miftahul Ulum Tanjungpinang adalah keseluruhan tolok ukur pencapaian pada siklus penjaminan mutu tentang seluruh penyelenggaraan proses pembelajaran. Tujuan penetapan standar ini adalah menjamin pemenuhan dan pencapaian mutu seluruh proses pembelajaran agar mencapai tujuan mutu pembelajaran. Standar Proses Pembelajaran IAI- Miftahul Ulum Tanjungpinang mengacu kepada PP No.

19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan/ (SNP), Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi No. 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SNPT), BAN-PT dan Peraturan Presiden No. 08 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indoneisa, Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 73 tahun 2013 tentang Pentunjuk Pelaksanaan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia, dan ketentuan atau prosedur lain yang dianggap dapat mendukung proses pembelajaran yang baik.

Penerapan karakteristik/spesifikasi kualifikasi lulusan harus jelas, tegas dan dapat diukur derajat pencapaiannya serta harus relevan (sesuai) dengan kebutuhan. Karakteristik ini ditentukan dari proses pembelajaran dan proses evaluasi hasil pembelajaran itu sendiri yang merupakan bagian dari lingkup proses pembelajaran di IAI-Miftahul Ulum Tanjungpinang

Lingkup Standar Proses Pembelajaran meliputi perencanaan pembelajaran, pelaksanaan pembelajaran, evaluasi hasil pembelajaran,pelaporan hasil evaluasi pelaksanaan pembelajaran dan sarana/ prasarana pembelajaran. Setiap proses yang ada di lingkup ini memiliki parameter dan ditentukan standarnya agar memudahkan pengukuran disaat proses audit berlangsung.

## Landasan Ideal

Landasan standar proses pembelajaran tertuang dalam Permenristekdikti No. 45 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi, BAN – PT dan Kebijakan Akademik IAI-Miftahul Ulum Tanjungpinang

* + - 1. Permendikbud No. 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SNPT) disebutkan bahwa:
         1. *Pasal 10 ayat 1:* Standar proses pembelajaran merupakan kriteria minimal tentang pelaksanaan pembelajaran pada program studi untuk memperoleh capaian pembelajaran lulusan.
         2. *Pasal 10 ayat 2:* Standar proses pembelajaran mencakup: karakteristik proses pembelajaran, perencanaan proses pembelajaran,pelaksanaan proses pembelajaran, dan beban belajar mahasiswa.
         3. *Pasal 11 ayat 1:* Karakteristik proses pembelajaran terdiri atas sifat interaktif, holistik, integratif, saintifik, kontekstual, tematik, efektif, kolaboratif, dan berpusat pada mahasiswa.
         4. *Pasal 12 ayat 1:* Perencanaan proses pembelajaran disusun untuk setiap mata kuliah dan disajikan dalam rencana pembelajaran semester (RPS) atau istilah lain.
         5. *Pasal 12 ayat 2:* Rencana pembelajaran semester (RPS) atau istilah lain ditetapkan dan dikembangkan oleh dosen secara mandiri atau bersama dalam kelompok keahlian suatu bidang ilmu pengetahuan dan/atau teknologi dalam program studi.
         6. *Pasal 13 ayat 1:* Pelaksanaan proses pembelajaran berlangsung dalam bentuk interaksi antara dosen, mahasiswa, dan sumber belajar dalam lingkungan belajar tertentu.
         7. *Pasal 14 ayat 1:* Proses pembelajaran melalui kegiatan kurikuler wajib dilakukan secara sistematis dan terstruktur melalui berbagai mata kuliah dan dengan beban belajar yang terukur.
      2. BAN-PT

Standar akreditasi perguruan tinggi mencakup dua komitmen inti, yaitu komitmen perguruan tinggi terhadap kapasitas institusional *(institutional capacity)* dan terhadap efektivitas program pendidikan *(educational effectiveness).* Keseluruhan standar perguruan tinggi dijabarkan ke dalam 28 standar IAI-Miftahul Ulum Tanjungpinang, dan diantaranya adalah Standar Proses Pembelajaran.

## Standar Mutu dan Indikator

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **No** | **Standar Proses Pembelajaran** | **Indikator** |
| 1 | Program studi menyelenggarakan perencanaan proses pembelajaran sesuai dengan KKNI | 1. Kegiatan kuliah dan praktikum dilengkapi dengan buku referensi yang mutakhir dan bahan ajar (handout/modul) 2. Perencanaan proses pembelajaran disusun untuk setiap mata kuliah dan disajikan dalam rencana pembelajaran semester (RPS) 3. RPS wajib ditinjau dan disesuaikan secara berkala dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi 4. Program studi menerapkan mekanisme penyusunan dan peninjauan materi perkuliahan dengan melibatkan kelompok dosen dalam satu bidang ilmu setiap   semester (mencakup materi kuliah, |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **No** | **Standar Proses Pembelajaran** | **Indikator** |
|  |  | metode pembelajaran, penggunaan teknologi pembelajaran dan cara-cara  evaluasinya) |
| 2 | Program studi menyelenggarakan/ melaksanakan proses pembelajaran dengan baik yang bersifat interaktif, holistik, integratif, saintifik, kontekstual, tematik, efektif, kolaboratif, dan berpusat pada mahasiswa. | 1. Jumlah mahasiswa per kelas maksimal 40 orang 2. Persentase mata kuliah (wajib/pilihan) program studi S1 yang menerapkan sistem SCL (*Student Centered Learning*) minimal 30%. 3. Persentase mata kuliah yang diselenggarakan dengan sistem *e- learning (blended system)* minimal 20%. 4. Program studi menerapkan mekanisme monitoring kehadiran mahasiswa, kehadiran dosen, dan kesesuaian materi kuliah yang diajarkan dengan silabus setiap semester. 5. Program studi menerapkan mekanisme penjaminan mutu soal ujian dan kesesuaiannya dengan isi silabus sehingga menghasilkan soal ujian yang bermutu baik dan dapat mengukur kompetensi   yang dirumuskan. |
| 3 | Program studi wajib menerapkan beban belajar mahasiswa sesuai aturan yang berlaku | 1. Jumlah beban belajar seorang mahasiswa paling sedikit 144 sks. 2. Kegiatan perkuliahan dan praktikum dilaksanakan secara penuh (14 kali pertemuan) dan sesuai dengan beban kreditnya. 3. Kegiatan praktikum mahasiswa menggunakan fasilitas laboratorium yang   dimiliki oleh IAI-Miftahul Ulum Tanjungpinang atau yang  dapat diakses oleh IAI-Miftahul Ulum Tanjungpinang. |

* 1. **Standar Penilaian Pendidikan**

## Pengertian dan Ruang Lingkup

Proses pembelajaran adalah kegiatan yang diterima oleh mahasiswa selama menempuh pendidikan di IAI-Miftahul Ulum Tanjungpinang, baik secara kurikuler maupun nonkurikuler. Proses pembelajaran harus dievaluasi untuk meningkatkan efektivitas dan kualitas proses pembelajaran tersebut. Penilaian terhadap proses pembelajaran tidak hanya dilakukan oleh dosen terhadap mahasiswa, tetapi juga dilakukan oleh mahasiswa terhadap dosen. Hasil evaluasi oleh dosen terhadap mahasiswa dinyatakan dalam nilai yang tercantum di DPNA, sedangkan hasil penilaian mahasiswa terhadap dosen dievaluasi oleh unit penjaminan mutu /Program Studi dengan pengawasan dari LPMP2M IAI- Miftahul Ulum Tanjungpinang.

## Landasan Ideal

Seuai dengan pasal 19 Permenristekdikti No. 44 tahun 2015 tentang SNPT, standar penilaian pembelajaran merupakan kriteria minimal tentang penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan. Ayat (2) Penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup: a. prinsip penilaian; b. teknik dan instrumen penilaian; c. mekanisme dan prosedur penilaian; d. pelaksanaan penilaian; e. pelaporan penilaian; dan f. kelulusan mahasiswa.

* + 1. **Standar Mutu dan Indikator**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **No** | **Standar Penilaian Pembelajaran** | **Indikator** |
| 1 | Program studi menyelenggarakan penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa mencakup prinsip penilaian, teknik dan instrumen penilaian, mekanisme dan prosedur penilaian, pelaksanaan penilaian, pelaporan penilaian, dan kelulusan mahasiswa. | 1. Program studi menyelenggarakan proses penilaian mengikuti prinsip edukatif, otentik, objektif, akuntabel, dan transparan yang dilakukan secara terintegrasi 2. Teknik penilaian terdiri atas observasi, partisipasi, unjuk kerja, tes tertulis, tes lisan, dan angket. 3. Dosen memberikan umpan balik dan kesempatan untuk mempertanyakan hasil penilaian kepada mahasiswa 4. Dosen mendokumentasikan penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa secara akuntabel dan transparan. 5. Dosen melakukan prosedur penilaian mencakup tahap perencanaan, kegiatan   pemberian tugas atau soal, observasi |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **No** | **Standar Penilaian Pembelajaran** | **Indikator** |
|  |  | kinerja, pengembalian hasil observasi, dan pemberian nilai akhir.  6. Program studi memasukan nilai tepat waktu untuk seluruh mata kuliah pada semester berjalan dalam jangka waktu maksimal sepuluh hari setelah pelaksanaan  ujian. |
| 2 | Penilaian hasil belajar oleh satuan pendidikan tinggi | 1. Penilaian proses pembelajaran (Kinerja Dosen) oleh mahasiswa dan teman sejawat dievaluasi oleh unit penjaminan mutu Jurusan/Program Studi 2. Tersedia Keputusan ketua tentang   *reward* dan *punishment* terhadap dosen bernilai sangat baik dan sangat buruk. |

## Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan

* + 1. **Pengertian dan Ruang Lingkup**

Di dalam Pasal 1 Butir 5 dan 6 UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (UU Sisdiknas), dinyatakan bahwa tenaga kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan. Sedangkan pendidik adalah tenaga kependidikan yang berkualifikasi sebagai guru, dosen, konselor pamong belajar, widyaiswara, tutor, instruktur, fasilitator, dan sebutan lain yang sesuai dengan kekhususannya, serta berpartisipasi dalam menyelenggarakan pendidikan. Di lingkungan pendidikan tinggi, tenaga kependidikan yang berkualifikasi sebagai pendidik disebut dosen, sedangkan tenaga kependidikan lainnya disebut tenaga penunjang.

Menurut UU No. 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen disebutkan bahwa dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarluaskan ilmupengetahuan, teknologi, dan seni melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. Dosen wajib memiliki kualifikasi akademik, kompetensi, sertifikat pendidik, sehat jasmani dan rohani, dan memenuhi kualifikasi lain yang dipersyaratkan satuan pendidikan tinggi tempat bertugas, serta memiliki kemampuan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional.

## Landasan Ideal

Landasan Ideal standar dosen dan kependidikan di IAI-Miftahul Ulum Tanjungpinang mengacu pada Permenristekdikti No. 44 tahun 2015 tentang SNPT. Pasal 26 menyebutkan bahwa standar dosen dan tenaga kependidikan merupakan kriteria minimal tentang kualifikasi dan kompetensi dosen dan tenaga kependidikan untuk menyelenggarakan pendidikan dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan. Dosen wajib memiliki kualifikasi akademik dan kompetensi pendidik, sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk menyelenggarakan pendidikan dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan. Kualifikasi akademik merupakan tingkat pendidikan paling rendah yang harus dipenuhi oleh seorang dosen dan dibuktikan dengan ijazah. Dosen program sarjana harus berkualifikasi akademik paling rendah lulusan magister atau magister terapan yang relevan dengan program studi.

## Standar dan Indikator

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **No** | **Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan** | **Indikator** |
| 1 | Dosen wajib memiliki kualifikasi akademik dan kompetensi pendidik, serta memiliki kemampuan untuk menyelenggarakan pendidikan dalam rangka pemenuhan capaian | 1. Dosen program sarjana harus berkualifikasi akademik paling rendah lulusan magister atau magister terapan yang relevan dengan program studi, dan dapat menggunakan dosen bersertifikat profesi yang relevan dengan program studi dan berkualifikasi paling rendah setara dengan jenjang 8 (delapan) KKNI). 2. Dosen program profesi harus berkualifikasi akademik paling rendah lulusan magister atau magister terapan yang relevan dengan program studi dan berpengalaman kerja paling sedikit 2 (dua) tahun, serta dapat menggunakan dosen bersertifikat profesi yang relevan dengan program studi, yang berpengalaman kerja paling sedikit 2 (dua) tahun, dan berkualifikasi paling rendah setara dengan jenjang 8 (delapan) KKNI). 3. Dosen program magister dan program magister terapan harus berkualifikasi akademik lulusan doktor atau doktor terapan yang relevan dengan program   studi, dan dapat menggunakan dosen |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | bersertifikat profesi yang relevan dengan |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **No** | **Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan** | **Indikator** |
|  |  | program studi dan berkualifikasi setara dengan jenjang 9 (delapan) KKNI).  4. Dosen program doktor dan program doktor terapan harus berkualifikasi akademik lulusan doktor atau doktor terapan yang relevan dengan program studi, dan dapat menggunakan dosen bersertifikat profesi yang relevan dengan program studi dan berkualifikasi setara dengan jenjang 9  (sembilan) KKNI. |
| 2 | Dosen wajib melakukan penghitungan Beban Kerja Dosen (BKD) secara periodik dan teratur. | 1. Penghitungan Beban Kerja Dosen didasarkan antara lain pada:    1. Kegiatan pokok dosen yang mencakup: (1) perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian proses pembelajaran; (2) Pelaksanaan evaluasi hasil pembelajaran; (3) Pembimbingan dan pelatihan; (4) Penelitian; dan (5) Pengabdian kepada masyarakat;    2. Kegiatan dalam bentuk pelaksanaan tugas tambahan; dan    3. Kegiatan penunjang. 2. Beban Kerja Dosen paling sedikit 40 Jam/Minggu,atau setara dengan mengelola 12 sks beban belajar mahasiswa, bagi dosen yang tidak mendapatkan tugas tambahan. 3. Beban kerja pada kegiatan pokok dosen disesuaikan dengan besarnya beban tugas tambahan, bagi dosen yang mendapatkan tugas tambahan. 4. Beban kerja dosen dalam membimbing penelitian terstruktur dalam rangka penyusunan skripsi/tugas akhir, tesis, disertasi, atau karya desain/seni/bentuk lain yang setara paling banyak 10   mahasiswa. |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **No** | **Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan** | **Indikator** |
| 3 | Dosen tetap wajib memiliki keahlian di bidang ilmu yang sesuai dengan disiplin ilmu pada program studinya. | 1. Jumlah dosen tetap pada setiap Program Studi minimal 90% dari jumlah seluruh dosen. 2. Jumlah dosen tetap yang ditugaskan secara penuh waktu untuk menjalankan proses pembelajaran pada setiap program studi paling sedikit 6 (enam) orang. 3. Dosen tetap untuk program spesialis dua, program doktor atau program doktor terapan paling sedikit memiliki 2 (dua)   orang guru besar atau profesor. |
| 4 | Tenaga Kependidikan wajib memiliki kualifikasi akademik dan kompetensi serta memiliki kemampuan untuk menyelenggarakan administrasi pendidikan dalam rangka layanan pendidikan. | 1. Tenaga Kependidikan memiliki kualifikasi akademik paling rendah lulusan program diploma 3 (tiga) yang dinyatakan dengan ijazah sesuai dengan kualifikasi tugas pokok dan fungsinya. 2. Khusus Tenaga Kependidikan bagi Tenaga Administrasi, memiliki kualifikasi akademik paling rendah SMA atau sederajat. 3. Tenaga kependidikan yang memerlukan keahlian khusus wajib memiliki sertifikat kompetensi sesuai dengan bidang tugas dan keahliannya. 4. Tenaga kependidikan wajib mengikuti pelatihan dalam bidangnya minimal satu   kali dalam setahun. |

* 1. **Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran**

## Pengertian dan Ruang Lingkup

Standar sarana dan prasarana pembelajaran merupakan kriteria minimal tentang sarana dan prasarana sesuai dengan kebutuhan isi dan proses pembelajaran dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan. Standar sarana pembelajaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 paling sedikit terdiri atas: a. perabot; b. peralatan pendidikan; c. media pendidikan; d. buku, buku elektronik, dan repositori; e. sarana teknologi informasi dan komunikasi;

f. instrumentasi eksperimen; g. sarana olahraga; h. sarana berkesenian; i. sarana fasilitas umum; j. bahan habis pakai; dan k. sarana pemeliharaan, keselamatan, dan keamanan. Sedangkan standar prasarana pembelajaran paling

sedikit terdiri atas: a. lahan; b. ruang kelas; c. perpustakaan; d. laboratorium/studio/bengkel kerja/unit produksi; e. tempat berolahraga; f. ruang untuk berkesenian; g. ruang unit kegiatan mahasiswa; h. ruang pimpinan perguruan tinggi; i. ruang dosen; j. ruang tata usaha; dan k. fasilitas umum.

## Landasan Ideal

Landasan ideal untuk standar Sarana dan Prasarana adalah Pasal 31-37 Peraturan Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi No 44 tahun 2015 tentang SNPT.

## Standar dan Indikator

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **No.** | **Standar Sarana dan**  **Prasarana Pembelajaran** | **Indikator** |
| 1 | Jurusan/Program Studi | 1. Bangunan: memenuhi persyaratan |
|  | didukung dengan prasarana pendidikan | teknis dan keamanan, serta jumlahnya mencukupi |
|  | yang memadai dan | 2. Ruang kerja pimpinan: minimal 15 m2 |
|  | bermutu baik (ruang kantor, ruang dosen, | per orang  3. Ruang administrasi kantor: minimal 2 |
|  | ruang kelas, ruang | m2 per orang |
|  | sidang) | 4. Ruang kerja setiap dosen: minimal 2 m2  per dosen |
|  |  | 5. Ruang kelas/aula: minimal 2 m2 per  mahasiswa |
|  |  | 6. Ruang ujian sidang sarjana: 16 m2 per |
|  |  | mahasiswa |
| 2 | Jurusan/fakultas didukung dengan prasarana air, listrik, dan gas yang  mencukupi | 1. Perlengkapan listrik: memenuhi persyaratan teknis dengan kondisi baik, ramah lingkungan, dipelihara secara rutin, dan tersedia setiap saat. 2. Fasilitas air: Sistem penyediaan air bersih, reservoir, perpipaan, dan perlengkapannya memenuhi persyaratan teknis, kualitas air memenuhi persyaratan air bersih, dan air tersedia setiap saat di seluruh bangunan. 3. Fasilitas gas: memenuhi persyaratan teknis dan keamanan, mencukupi, berkualitas baik, dan tersedia setiap   saat. |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **No.** | **Standar Sarana dan**  **Prasarana Pembelajaran** | **Indikator** |
| 3 | Jurusan/fakultas didukung oleh prasarana penunjang yang lengkap,  bermutu baik dan mencukupi untuk | 1. Toilet: memenuhi persyaratan teknis, jumlahnya mencukupi, tersedia air bersih setiap saat, berfungsi baik, dan   dilakukan pembersihan secara rutin minimal 2 kali sehari.   1. Kantin: luasan minimal 4 m2 per   mahasiswa, ventilasi baik, fasilitas penjualan dan ruang makan memenuhi persyaratan sanitasi dengan didukung fasilitas air bersih untuk cuci tangan dan pencucian peralatan yang mencukupi, pembuangan air yang tertutup, dan penjaja makanan yang memenuhi persyaratan higiene.   1. Ruang himpunan mahasiswa: minimal   25 m2 per ruangan   1. Poliklinik: tersedia mencukupi, berkualitas baik dan memenuhi persyaratan untuk poliklinik. 2. Auditorium: sesuai dengan jumlah maksimal wisudawan 3. Asrama mahasiswa: jumlah kamar sesuai dengan daya tampung yang direncanakan (2 orang per kamar), bermutu baik dan dirawat secara terjadwal. 4. Gedung olahraga: memenuhi kriteria gedung (indoor) untuk pemakaian jenis cabang olah raga tertentu, berkualitas baik, dan dapat diakses dengan mudah. 5. Tempat ibadah (mushola/mesjid): 2 m2   per orang, bermutu baik, dan jumlah mencukupi   1. Ruang perpustakaan: 1.6 m2 per orang.   Jumlah koleksi textbook yang sesuai bidang ilmu: 100 (dalam tiga tahun terakhir). Jumlah koleksi disertasi/tesis/skripsi/tugas akhir: 200 (dalam tiga tahun terakhir).   1. Jumlah jurnal ilmiah terakreditasi Dikti |
|  | kebutuhan mahasiswa. |
| 4 | Jurusan/fakultas didukung oleh perpustakaan dengan koleksi pustaka yang sesuai bidang dengan jumlah yang memadai |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **No.** | **Standar Sarana dan**  **Prasarana Pembelajaran** | **Indikator** |
|  |  | yang sesuai bidang: ≥ 3 judul dengan nomor lengkap (dalam tiga tahun terakhir)   1. Jumlah jurnal terakreditasi non-Dikti yang sesuai bidang: ≥ 3 judul dengan nomor lengkap (dalam tiga tahun terakhir) 2. Jumlah jurnal ilmiah nasional tidak terakreditasi yang sesuai bidang: ≥ 3 judul dengan nomor lengkap (dalam tiga tahun terakhir) 3. Jumlah jurnal ilmiah internasional yang sesuai bidang: ≥ 2 judul dengan nomor lengkap (dalam tiga tahun terakhir) 4. Jumlah prosiding seminar yang sesuai bidang: > 6 judul (dalam tiga tahun terakhir). 5. Prodi memiliki akses yang mudah ke perpustakaan di luar perguruan tinggi   (termasuk akses secara online) |
| 5 | Proses belajar mengajar di program studi didukung sarana  laboratorium | Tersedia laboratoriun sesuai dengan jurusan dan berfungsi secara baik. |
| 6 | Ruangan untuk kegiatan  akademik | 1. Setiap kelas yang digunakan untuk   kegiatan perkuliahan dilengkapi |
|  | (kuliah/praktikum/ | dengan sarana belajar yang mencukupi |
|  | penelitian tugas | (kursi, meja, papan tulis, spidol, |
|  | akhir/seminar | penghapus, LCD, dekstop/laptop, AC/ |
|  | mahasiswa/ujian sidang | kipas angin, sound system, dan |
|  | sarjana) didukung | internet/Wifi), serta dapat digunakan |
|  | peralatan utama yang | setiap hari (minimal 20 jam/minggu)’ |
|  | mencukupi, bermutu  baik dan dapat | 2. Setiap ruangan yang digunakan untuk  kegiatan praktikum/penelitian tugas |
|  | digunakan setiap saat. | akhir dilengkapi dengan sarana |
|  |  | praktikum (kursi, meja kerja, papan |
|  |  | tulis, spidol, peralatan praktikum dan |
|  |  | bahan habis) yang mencukupi, |
|  |  | bermutu baik dan dapat digunakan |
|  |  | setiap hari. |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **No.** | **Standar Sarana dan**  **Prasarana Pembelajaran** | **Indikator** |
| 7 | Proses belajar mengajar didukung oleh sistem pengelolaan data dan informasi tentang penyelenggaraan program akademik di program studi yang mudah diakses | 1. Tersedia komputer dan perangkat lunak yang lengkap dan canggih 2. Sistem teknologi informasi selalu ditata dan di-*upgrade* minimal 1 tahun 1 kali 3. Akses untuk dosen, mahasiswa dan pegawai lainnya terhadap fasilitas komputer minimal 18 jam per hari 4. Adanya kebijakan pemeliharaan dan   modernisasi komputer serta didukung dana yang memadai   1. Komputer dihubungkan dengan jaringan lokal dan internet (kapasitas akses internet: 1 kpbs per mahasiswa) 2. Rasio jumlah komputer per mahasiswa minimal 1:10 3. Ruang komputer minimal 1 m2 per mahasiswa 4. Ketersediaan sarana e-learning yang didukung oleh piranti keras, piranti lunak dan manual yang memadai dan dapat dioperasikan, serta dipelihara secara layak. 5. Pengelolaan data akademik di program studi didukung oleh sistem informasi yang tertelusur, ditangani dengan komputer, dan dapat diakses melalui jaringan luas/ WAN) 6. Fakultas memiliki situs web berbahasa Indonesia dan Inggris yang menyediakan informasi akademik dan non-akademik bagi pemangku kepentingan, dan datanya selalu dimutahirkan secara reguler (minimal 1   kali per minggu). |

* 1. **Standar Pengelolaan Pembelajaran**

## Pengertian dan Ruang Lingkup

Standar pengelolaan pembelajaran merupakan kriteria minimal tentang perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan pembelajaran pada tingkat program studi. Standar

pengelolaan pembelajaran harus mengacu pada standar kompetensi lulusan, standar isi pembelajaran, standar proses pembelajaran, standar dosen dan tenaga kependidikan, serta standar sarana dan prasarana pembelajaran.

## Landasan Ideal

Landasan ideal untuk standar Sarana dan Prasarana adalah Pasal 38-39 Permenristekdikti No. 44 tahun 2015 tentang SNPT.

## Standar dan Indikator

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **No** | **Standar Pengelolaan**  **Pembelajaran** | **Indikator** |
| 1 | Jurusan/Program studi wajib melakukan perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan pembelajaran. | 1. Jurusan wajib melakukan penyusunan kurikulum dan rencana pembelajaran dalam setiap mata kuliah. 2. Jurusan wajib menyelenggarakan program pembelajaran sesuai standar isi, standar proses, standar penilaian yang telah ditetapkan dalam rangka mencapai capaian pembelajaran lulusan. 3. Jurusan wajib melakukan kegiatansistemik   yang menciptakan suasana akademik dan budaya mutu yang baik.   1. Jurusan wajib melakukan kegiatan pemantauan dan evaluasi secara periodik dalam rangka menjaga dan meningkatkan mutu proses pembelajaran. 2. Jurusan wajib melaporkan hasil program pembelajaran secara periodik sebagai sumber data dan informasi dalam pengambilan keputusan perbaikan dan pengembangan mutu pembelajaran. 3. Dsoen harus melakukan proses input nilai secara on-line melalui Sistem Informasi   Akademik (SIAKAD) |

* 1. **Standar Pembiayaan Pembelajaran**

## Pengertian dan Ruang Lingkup

Standar pembiayaan pembelajaran merupakan kriteria minimal tentang komponen dan besaran biaya investasi dan biaya operasional yang disusun dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan. Biaya investasi pendidikan tinggi adalah bagian dari biaya pendidikan tinggi untuk pengadaan sarana dan prasarana, pengembangan dosen, dan tenaga kependidikan

pendidikan tinggi. Biaya operasional pendidikan tinggi adalah bagian dari biaya pendidikan tinggi yang diperlukan untuk melaksanakan kegiatan pendidikan yang mencakup biaya dosen, biaya tenaga kependidikan, biayabahan operasional pembelajaran, dan biaya operasional tidak langsung. Biaya operasional pendidikan tinggi ditetapkan per mahasiswa per tahun yang disebut dengan standar satuan biaya operasional pendidikan tinggi.

Standar satuan biaya operasional pendidikan tinggi bagi IAI-Miftahul Ulum Tanjungpinang ditetapkan secara periodik oleh yayasan dengan mempertimbangkan jenis program studi, tingkat akreditasi perguruan tinggi dan program studi dan indeks kemahalan wilayah. Standar satuan biaya operasional pendidikan tinggi menjadi dasar bagi setiap perguruan tinggi untuk menyusun rencana anggaran pendapatan dan belanja (RAPB) perguruan tinggi tahunan dan menetapkan biaya yang ditanggung oleh mahasiswa.

## Landasan Ideal

Landasan ideal standar pembiayaan pembelajaran tercantum dalam Peraturan Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi (Permenristekdikti) Nomor 44 tahun 2015 Pasal 40, 41 dan 42.

* + 1. **Standar Pembiayaan Pembelajaran dan Indikator**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **No** | **Standar Pembiayaan**  **Pembelajaran** | **Indikator** |
| **1** | Jurusan/program studi | 1. Jurusan / prodi memiliki perencanaan sasaran mutu, perencanaan kegiatan/kerja dan perencanaan/alokasi dan pengelolaan dana sesuai prosedur/   mekanisme yang berlaku di IAI-Miftahul Ulum Tanjungpinang dan terdokumentasi secara baik dan tertelusur   1. Rata-rata dana operasional (pendidikan, penelitian, pengabdian pada masyarakat, termasuk gaji dan upah) lebih dari 10 juta per mahasiswa per tahun 2. Rata-rata dana penelitian dosen: Lebih dari Rp 3 juta per dosen tetap per tahun. 3. Rata-rata dana yang diperoleh dalam   rangka pelayanan/pengabdian kepada masyarakat: Lebih dari Rp 1.5 juta per dosen tetap per tahun.   1. Rata-rata jumlah dan dana kegiatan |
|  | memperoleh dana |
|  | operasional |
|  | penyelenggaraan |
|  | tridarma secara memadai |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **No** | **Standar Pembiayaan Pembelajaran** | **Indikator** |
|  |  | kepakaran dengan pemerintah di lingkungan jurusan: Minimal satu kegiatan per dosen tetap per tahun dengan dana minimal Rp 1 juta per dosen tetap per tahun.   1. Penggunaan dana PPM (pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat) dari total pemasukan dana lebih dari 10% 2. Rata-rata jumlah dan dana kegiatan kepakaran di lingkungan jurusan dengan pemerintah/ swasta: Masing- masing minimal satu kegiatan per dosen tetap per tahun dengan dana minimal Rp 1 juta per dosen tetap per tahun. 3. Dana (termasuk hibah) yang dikelola lebih dari Rp 30 juta per dosen tetap per tahun (mencakup gaji, tunjangan fungsional, biaya PPM, insentif kinerja dosen, kepakaran, tunjangan sertifikasi dosen, dan bisnis dan kerjasama). |

# BAB IV STANDAR PENELITIAN

Penelitian dalam dunia pendidikan tinggi diartikan sebagai kegiatan mencari kebenaran yang dilakukan menurut kaidah dan metode ilmiah secara sistematis untuk memperoleh informasi, data dan keterangan yang berkaitan dengan pemahaman dan pembuktian kebenaran atau ketidakbenaran suatu asumsi dan/atau hipotesis di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi serta menarik kesimpulan ilmiah bagi keperluan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Sasaran utama penelitian di IAI-MU Tanjungpinang adalah untuk meningkatkan kualitas penelitian unggulan yang bermanfaat bagi masyarakat dan kemajuan bangsa untuk berperan aktif dalam perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, budaya dan seni. Oleh itu, sangat diperlukan koordinasi pada semua Jurusan/ Program Studi agar kegiatan berbagai bidang penelitian mengarah pada penelitian unggulan yang telah ditetapkan oleh IAI-MU Tanjungpinang.

* 1. **Standar Hasil Penelitian**

## Pengertian dan Ruang Lingkup

Penelitian dalam dunia pendidikan tinggi diartikan sebagai kegiatan mencari kebenaran yang dilakukan menurut kaidah dan metode ilmiah secara sistematis untuk memperoleh informasi, data dan keterangan yang berkaitan dengan pemahaman dan pembuktian kebenaran atau ketidakbenaran suatu asumsi dan/atau hipotesis di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi serta menarik kesimpulan ilmiah bagi keperluan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Untuk mengisi bidang penelitian unggulan IAI-MU Tanjungpinang, ada

2 kategori penelitian yang dapat dilaksanakan oleh peneliti IAI-MU Tanjungpinang, yaitu:

1. Penelitian yang berkaitan dan kehidupan keagamaan dan budaya lokal borneo.
2. Penelitian terapan: di bidang ketarbiyahan dan keguruan, di bidang syari’ah dan ekonomi Islam.

Dengan merujuk pada produk yang dihasilkan maka ruang lingkup penelitian di IAI-MU Tanjungpinang dapat dikelompokkan menjadi dua kelompok yaitu:

1. Lingkup pertama adalah penelitian yang terkait langsung dengan kegiatan pendidikan dengan output skripsi, tesis, disertasi, dan publikasi ilmiah

atau penelitian yang dipakai untuk meningkatkan kualitas mengajar dengan output buku ajar;

1. Lingkup kedua adalah penelitian yang dilakukan untuk tujuan pengembangan teori dan ilmu pengetahuan atau untuk tujuan pelayanan dan pengabdian pada publik dengan output berupa produk dan paten.

Kedua lingkup penelitian ini saling terkait dan saling menopang dandapat melibatkan semua staf akademik IAI-MU Tanjungpinang beserta mahasiswanya dan juga berbagai pihak luar yang berkepentingan.

## Landasan Ideal

Mengacu pada Permenristekdikti No. 44 tahun 2015 tentang SNPT disebutkan: ayat (1) Standar hasil penelitian merupakan kriteria minimal tentang mutu hasil penelitian. Ayat (2) Hasil penelitian di perguruan tinggi diarahkan dalam rangka mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan daya saing bangsa. Ayat (3) Hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan semua luaran yang dihasilkan melalui kegiatan yang memenuhi kaidah dan metode ilmiah secara sistematis sesuai otonomi keilmuan dan budaya akademik. Ayat (4) Hasil penelitian mahasiswa harus memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), capaian pembelajaran lulusan, dan ketentuan peraturan di perguruan tinggi.

## Standar dan Indikator

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **No** | **Standar Hasil**  **Penelitian** | **Indikator** |
| 1 | Institusi mengimplementasikan pedoman penelitian | Adanya pedoman penelitian yang indikatornya berupa tinjauan (*review*) terhadap berbagai aspek terkait pelaksanaan  penelitian. |
| 2 | Penelitian harus memiliki kegunaan dan relevansi dengan pendidikan dan ilmu pengetahuan | Keterkaitan penelitian dengan pendidikan berupa:   1. minimal satu mahasiswa yang dilibatkan dalam setiap penelitian 2. Jumlah penelitian yang memperoleh HaKI minimal 1 per program studi/pusat dalam setiap 3 tahun. 3. Jumlah prototipe produk/model/kebijakan yang dihasilkan minimal 1 per program   studi/pusat dalam setiap 3 tahun. |
| 3 | Penelitian diutamakan yang memiliki nilai  komersial | Jumlah hasil penelitian yang telah dikomersilkan minimal 1 per program  studi/pusat dalam setiap 5 tahun. |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **No** | **Standar Hasil**  **Penelitian** | **Indikator** |
| 4 | Hasil penelitian dipublikasikan dalam bentuk artikel ilmiah (buku, prosiding, jurnal nasional dan internasional, HaKI/paten) | 1. Jumlah tulisan ilmiah yang dipublikasikan dalam bentuk buku, prosiding seminar, jurnal ilmiah nasional/internasional minimal 1 per penelitian. 2. Jumlah karya penelitian dosen yang memperoleh penghargaan/ award di tingkat nasional/ internasional minimal 1 karya per program studi per 5 tahun. 3. Jumlah HaKI yang diregistrasi minimal 1 per program studi dan/atau pusat per 5   tahun. |
| 5 | Dosen di program jurusan/studi melaksanakan kegiatan penelitian dengan  melibatkan mahasiswa | Jumlah penelitian dosen yang sesuai bidang keilmuannya atas biaya sendiri atau dibiayai dari dalam atau luar negeri (sebagai ketua atau anggota per dosen per tahun) dan melibatkan  mahasiswa minimal 1 judul per tahun |

* 1. **Standar Isi Penelitian**

## Pengertian dan Ruang Lingkup

Standar isi penelitian merupakan kriteria minimal tentang kedalaman dan keluasan materi penelitian. Kedalaman dan keluasan materi penelitian meliputi materi pada penelitian dasar dan penelitian terapan. Materi pada penelitian dasar harus berorientasi pada hasil penelitian yang berupa penjelasan atau penemuan untuk mengantisipasi suatu gejala, fenomena, kaidah, model, atau postulat baru. Materi pada penelitian terapan harus berorientasi pada hasil penelitian yang berupa inovasi serta pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang bermanfaat bagi masyarakat, dunia usaha, dan/atau industri. Materi pada penelitian dasar dan penelitian terapan mencakup materi kajian khusus untuk kepentingan nasional. Materi pada penelitian dasar dan penelitian terapan harus memuat prinsip-prinsip kemanfaatan, kemutahiran, dan mengantisipasi kebutuhan masa mendatang.

## Landasan Ideal

Landasan ideal standar isi penelitian merujuk kepada pasal 45 Permenristekdikti No 44 tahun 2015 tentang SNPT.

## Standar dan Indikator

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **No** | **Standar Isi Penelitian** | **Indikator** |
| **1** | Penelitian dilaksanakan sesuai dengan mandat jurusan/program  studi/pusat/ | Jumlah penelitian yang sesuai dengan mandat program studi/pusat masing- masing, minimal 50%. |
| **2** | Penelitian dilaksanakan harus bermutu | Jumlah publikasi ilmiah yang terakreditasi nasional maupun internasional minimal 50% dari jumlah  penelitian yang diperoleh dosen. |

* 1. **Standar Proses Penelitian**

## Pengertian dan Ruang Lingkup

Standar proses penelitian merupakan kriteria minimal tentang kegiatan penelitian yang terdiri atas perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan. Kegiatan penelitian merupakan kegiatan yang memenuhi kaidah dan metode ilmiah secara sistematis sesuai dengan otonomi keilmuan dan budaya akademik. Kegiatan penelitian harus mempertimbangkan standar mutu, keselamatan kerja,kesehatan, kenyamanan, serta keamanan peneliti, masyarakat, dan lingkungan. Kegiatan penelitian yang dilakukan oleh mahasiswa dalam rangkamelaksanakan tugas akhir, skripsi, tesis, atau disertasi, selain harus mengarah pada terpenuhinya capaian pembelajaran lulusan serta memenuhi ketentuan danperaturan di IAI- MU Tanjungpinang. Kegiatan penelitian yang dilakukan oleh mahasiswa dinyatakan dalam besaran satuan kredit semester.

## Landasan Ideal

Landasan ideal standar proses penelitian merujuk kepada pasal 46 Permenristekdikti No 44 tahun 2015 tentang SNPT.

* + 1. **Standar dan Indikator**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **No** | **Standar Proses**  **Penelitian** | **Indikator** |
| 1 | Perencanaan penelitian | Ada perencanaan penelitian (*road map*) di  fakultas/lembaga/pusat. |
| 2 | Pelaksanaan penelitian | 1. Penelitian dilaksanakan sesuai dengan   *road map*   1. Penelitian dilaksanakan sesuai dengan   *time schedule*.   1. Penelitian dilaksanakan sesuai pedoman penelitian. |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **No** | **Standar Proses**  **Penelitian** | **Indikator** |
| 3 | Monitoring dan evaluasi  penelitian | Adanya monitoring dan evaluasi terhadap  pelaksanaan penelitian. |

## Standar Penilaian Penelitian

* + 1. **Pengertian dan Ruang Lingkup**

Standar penilaian penelitian merupakan kriteria minimal penilaianterhadap proses dan hasil penelitian. Penilaian proses dan hasil penelitian dilakukan secara terintegrasi dengan prinsip penilaian paling sedikit: a. edukatif, yang merupakan penilaian untuk memotivasi peneliti agar terus meningkatkan mutu penelitiannya; b. objektif, yang merupakan penilaian berdasarkan kriteria yang bebas dari pengaruh subjektivitas; c. akuntabel, yang merupakan penilaian penelitian yang dilaksanakan dengan kriteria dan prosedur yang jelas dan dipahami oleh peneliti; dan d. transparan, yang merupakan penilaian yang prosedur dan hasil penilaiannya dapat diakses oleh semua pemangku kepentingan. Penilaian proses dan hasil penelitian harus juga memperhatikan kesesuaian dengan standar hasil, standar isi, dan standar proses penelitian. Penilaian penelitian dapat dilakukan dengan menggunakan metode dan instrumen yang relevan, akuntabel, dan dapat mewakili ukuran ketercapaian kinerja proses dan pencapaian kinerja hasil penelitian. Penilaian penelitian yang dilaksanakan oleh mahasiswa dalam rangka penyusunan laporan tugas akhir, skripsi, tesis, atau disertasi diatur berdasarkan ketentuan dan peraturan di IAI- MU Tanjungpinang.

## Landasan Ideal

Landasan ideal Standar Penilaian Penelitian tercantum dalam Permenristekdikti Nomor 44 tahun 2015 pada Pasal 47.

## Standar dan Indikator

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **No** | **Standar Penilaian**  **Penelitian** | **Indikator** |
| 1 | Perencanaan | 1. Adanya rencana jangka panjang, menengah dan tahunan. 2. Adanya perencanaan anggaran/dana yang   memadai dan berkelanjutan. |
| 2 | Pelaksanaan | 1. Adanya kesesuaian pelaksana penelitian dengan proposal. 2. Adanya kesesuaian isi penelitian dengan proposal. 3. Adanya kesesuaian waktu pelaksanaan   penelitian dengan proposal. |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **No** | **Standar Penilaian**  **Penelitian** | **Indikator** |
|  |  | 4. Adanya kesesuaian anggaran/dana pelaksanaan penelitian dengan proposal. |
| 3 | Evaluasi dan perbaikan | 1. Ada checklist penilaian kesesuaian 2. Ada tindakan koreksi terhadap ketidaksesuaian |

* 1. **Standar Peneliti**

## Pengertian dan Ruang Lingkup

Standar peneliti merupakan kriteria minimal kemampuan peneliti untuk melaksanakan penelitian. Peneliti wajib memiliki kemampuan tingkat penguasaan metodologi penelitian yang sesuai dengan bidang keilmuan, objek penelitian, serta tingkat kerumitan dan tingkat kedalaman penelitian. Kemampuan peneliti ditentukan berdasarkan: kualifikasi akademik dan hasil penelitian. Kemampuan peneliti menentukan kewenangan melaksanakan penelitian. Standar Peneliti dapat dikembangkan berdasarkan: pengalaman, kredibilitas, kemampuan kerjasama, komitmen waktu, penghargaan nasional dan internasional, konsultan/staf ahli, terlibat dalam penelitian internasional, kelompok peneliti bermutu, dan penelitian sesuai jadwal.

## Landasan Ideal

Landasan ideal Standar Peneliti tercantum dalam Permenristekdikti Nomor 44 tahun 2015 Pasal 48 tentang SNPT.

## Standar dan Indikator

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **No** | **Standar Peneliti** | **Indikator** |
| 1 | Profesionalisme peneliti | Ada kesesuaian bidang keilmuan peneliti  dengan tema penelitian. |
| 2 | Capaian peneliti | Jumlah penghargaan yang diperoleh:   1. Minimal 1 penghargaan berskala nasional per program studi/pusat per 5 tahun 2. Minimal 1 penghargaan berskala internasional per program studi/pusat per   5 tahun |
| 3 | Sumberdaya dosen yang mencukupi dan memenuhi kualifikasi  pendidikan | Persentase dosen yang mengikuti sabbatical leave, post doc, atau kerjasama penelitian di luar negeri > 1% (terhadap jumlah dosen di  jurusan/program studi) |
| 4 | Peneliti wajib memiliki  kemampuan tingkat | 1. Kemampuan peneliti ditentukan  berdasarkan: |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **No** | **Standar Peneliti** | **Indikator** |
|  | penguasaan metodologi penelitian yang sesuai dengan bidang keilmuan, objek penelitian, serta tingkat kerumitan dan tingkat kedalaman penelitian dalam melaksanakan  penelitian. | 1. Kualifikasi Akademik; dan 2. Hasil Penelitian. 3. Kemampuan peneliti menentukan kewenangan dalam melaksanakan penelitian. 4. Setiap Dosen harus mengikuti pelatihan metodologi penelitian agar mampu melaksanakan penelitian dengan baik. |
| 5 | Peneliti memperoleh prestasi dalam mendapatkan penghargaan hibah, pendanaan program dan kegiatan penelitian dari tingkat nasional dan  internasional . | Setiap Jurusan/Program Studi mendapatkan penghargaan hibah, pendanaan program dan kegiatan penelitian dari institusi nasional/ internasioanal minimal 1 penelitian / tahun. |

* 1. **Standar Sarana dan Prasarana Penelitian**

## Pengertian dan Ruang Lingkup

Standar sarana dan prasarana penelitian merupakan kriteria minimal sarana dan prasarana yang diperlukan untuk menunjang kebutuhan isi dan proses penelitian dalam rangka memenuhi hasil penelitian. Sarana dan prasarana penelitian merupakan fasilitas perguruan tinggi yang digunakan untuk memfasilitasi penelitian paling sedikit terkait dengan bidang ilmu program studi.

Sarana dan prasarana penelitian di perguruan tinggi juga dimanfaatkan untuk kegiatan proses pembelajaran dan pengabdian kepada masyarakat. Oleh karena itu, sarana prasarana penelitian harus memenuhi standar mutu keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, keamanan peneliti, masyarakat dan lingkungan.

## Landasan Ideal

Landasan ideal standar sarana dan prasarana penelitian tercantum dalam Permenristekdikti No. 44 tahun 2015 pasal 49 tentang SNPT.

* + 1. **Standar dan Indikator**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **No** | **Standar Sarana dan**  **Prasarana Penelitian** | **Indikator** |
| 1 | Institut/Fakultas/lemba ga/ pusat harus menyediakan sarana dan prasarana yang mendukung kegiatan penelitian. | 1. Tersedia sarana dan prasarana pendukung penelitian dengan jumlah yang memadai dengan kualitas yang baik 2. Minimal 40% penelitian dilaksanakan dengan sarana dan prasarana milik Institusi (seperti laboratorium, studio, bengkel, kolam percobaan, dll   dilengkapi dengan peralatan). |
| 2 | Dana operasional penelitian | Rata-rata dana penelitian dosen lebih dari Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) per  dosen tetap per tahun. |
| 3 | Kontrak penelitian | Terdapat kontrak penelitian antara peneliti dengan penyandang dana penelitian yang  didokumentasikan di Lembaga Penelitian |
| 4 | Fasilitas | 1. Ketersediaan dana bagi peneliti yang mempublikasikan hasil penelitiannya di jurnal internasional terindeks scopus dan jurnal nasional terakreditasi 2. Ketersediaan dana bagi peneliti yang mempublikasikan hasil penelitiannya dalam bentuk buku referensi 3. Ketersediaan dana bagi peneliti yang mendaftarkan hasil penelitiannya dalam bentuk paten 4. Ketersediaan dana bagi peneliti yang mempresentasikan hasil penelitiannya di   seminar nasional/internasional. |

## Standar Pengelolaan Penelitian

* + 1. **Pengertian dan Ruang Lingkup**

Standar pengelolaan penelitian merupakan kriteria minimal tentang perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan penelitian. Pengelolaan penelitian dilaksanakan oleh unit kerja dalam bentuk kelembagaan yang bertugas untuk mengelola penelitian. Kelembagaan adalah lembaga penelitian, lembaga penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, atau bentuk lainnya yang sejenis sesuai dengan kebutuhan dan ketentuan perguruan tinggi.

## Landasan Ideal

Landasan ideal Standar Pengelolaan Penelitian tercantum dalam Permendikbud Nomor 44 tahun 2015 Pasal 50 dan 52.

* + 1. **Standar dan Indikator**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **No** | **Standar Pengelolaan**  **Penelitian** | **Indikator** |
|  | Pengeloaan penelitian | 1. Penelitian dikelola oleh Lembaga Penelitian dan Pengabdian masyarakat 2. Adanya kesesuaian kegiatan penelitian dengan rencana induk penelitian IAIMU Tanjungpinang 3. Memiliki lembaga Penjamin atau Kendali Mutu dengan tugas dan tanggung jawab yang jelas dalam pengendalian mutu penelitian. 4. Adanya SOP pelaksnaan, monitoring dan   evaluasi terhadap pelaksanaan penelitian. |

## Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian

* + 1. **Pengertian dan Ruang Lingkup**

Standar pendanaan dan pembiayaan penelitian merupakan kriteriaminimal sumber dan mekanisme pendanaan dan pembiayaan penelitian. Universitas wajib menyediakan dana penelitian internal. Selain dari anggaran penelitian internal universitas, pendanaan penelitian dapat bersumber dari pemerintah, kerja sama dengan lembaga lain baik di dalam maupun di luar negeri, atau dana dari masyarakat. Pendanaan penelitian digunakan untuk membiayai:

1. perencanaan penelitian;
2. pelaksanaan penelitian;
3. pengendalian penelitian;
4. pemantauan dan evaluasi penelitian;
5. pelaporan hasil penelitian; dan
6. diseminasi hasil penelitian.

## Landasan Ideal

Landasan ideal Standar Pengelolaan Penelitian tercantum dalam Permenristekdikti Nomor 44 tahun 2015 Pasal 53 dan 54.

* + 1. **Standar dan Indikator**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **No** | **Standar Pendanaan dan Pembiayaan**  **Penelitian** | **Indikator** |
| 1 | Dana penelitian yang memadai | Rata-rata dana penelitian dosen > Rp. 10 juta per dosen tetap per tahun  Persentase penggunaan dana Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat > 5% total  pemasukan dana |
| 2 | Pendanaan yang berasal dari kerjasama kegiatan penelitian dengan instansi di dalam/luar negeri yang relevan  dengan mandat. | 1. Persentase rata-rata jumlah penelitian dosen yang sesuai bidang per tahun yang bekerjasama dengan dalam negeri > 20% 2. Persentase rata-rata jumlah penelitian dosen yang sesuai bidang per tahun yang   bekerjasama dengan luar negeri > 10% |

# BAB V

**STANDAR PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT**

Pengabdian kepada masyarakat diartikan sebagai pengamalan ipteks yang dilakukan oleh sivitas akademika secara melembaga melalui metode ilmiah langsung kepada masyarakat (di luar kampus yang tidak terjangkau oleh program pendidikan formal) yang membutuhkan, dalam upaya menyukseskan pembangunan dan mengembangkan sumber daya manusia. Jasa kepakaran adalah layanan kepada masyarakat yang mengandalkan kepakaran staf akademik dan dilaksanakan secara melembaga. Jasa kepakaran yang dicakup dalam standar mutu ini adalah jasa kepakaran yang berkeadilan untuk melindungi semua pihak yang terlibat dalam kerjasama jasa kepakaran yang dimaksud.

Pengabdian kepada masyarakat adalah salah satu dharma ketiga Perguruan Tinggi. Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat mencakup berbagai macam kegiatan di luar pembelajaran dan riset yang reguler, dimana Institut/lembaga/ fakultas/departemen memberikan pelayanan secara langsung kepada masyarakat. Dharma jasa pelayanan tersebut dilakukan melalui kepakaran akademik dengan memanfaatkan fasilitas-fasilitas yang tersedia di Institut. Secara umum, suatu kegiatan pengabdian kepada masyarakat dan kerjasama adalah untuk penerapan ilmu yang bertujuan kepada pemberdayaan atau peningkatan kemampuan kepada masyarakat baik untuk hal-hal yang bersifat non-profit maupun profit demi keberlangsungan finansial kegiatan tersebut *(financial suIAInability).* Ruang lingkup pengabdian kepada masyarakat dan kerjasama dapat berupa kegiatan jasa konsultasi, pelatihan, lokakarya, seminar, riset terapan dan/atau penyelenggaraan kursus yang dilengkapi analisis untuk merumuskan serta menemukan solusi pemecahan masalah sikap inovatif dan kreatif.

## Standar Hasil Pengabdian Masyarakat

* + 1. **Pengertian dan Ruang Lingkup**

Standar hasil pengabdian kepada masyarakat merupakan kriteriaminimal hasil pengabdian kepada masyarakat dalam menerapkan, mengamalkan, dan membudayakan ilmu pengetahuan dan teknologi guna memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa.

Hasil pengabdian kepada masyarakat adalah:

1. penyelesaian masalah yang dihadapi masyarakat dengan memanfaatkan keahlian sivitas akademika yang relevan;
2. pemanfaatan teknologi tepat guna;
3. bahan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi; atau
4. bahan ajar atau modul pelatihan untuk pengayaan sumber belajar.

## Landasan Ideal

Landasan ideal Standar Pengelolaan Penelitian tercantum dalam Permenristekdikti Nomor 44 tahun 2015.

* + 1. **Standar dan Indikator**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **No** | **Standar** Hasil Pengabdian  Masyarakat | **Indikator** |
| 1 | Isi pengabdian harus mencakup aplikasi penelitian dan pengembangan teknologi tepat guna bagi masyarakat yang harus memuat prinsip- prinsip kemanfaatan, kemutakhiran, dan mengantisipasi kebutuhan masa datang | 1. Penghargaan nasional dan internasional judul/tahun meningkat. 2. Publikasi dalam bentuk jurnal, poster, pengajuan paten/HKI, karya tulis ilmiah populer dan laporan pengabdian. 3. Jumlah pengabdian yang memuat inovasi dan berguna bagi masyarakat. 4. Jumlah teknologi tepat guna yang dapat dimanfaatkan. 5. Pengabdian sesuai jadwal |

## Standar Isi Pengabdian Kepada Masyarakat

* + 1. **Pengertian dan Ruang Lingkup**

Standar isi pengabdian kepada masyarakat merupakan kriteria minimal tentang kedalaman dan keluasan materi pengabdian kepada masyarakat. Kedalaman dan keluasan materi pengabdian kepada masyarakat mengacu pada standar hasil pengabdian kepada masyarakat.

## Landasan Ideal

Landasan ideal Standar Pengelolaan Penelitian tercantum dalam Permendikbud Nomor 44 tahun 2015.

## Standar dan Indikator

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **No** | **Standar Isi Pengabdian**  **Kepada Masyarakat** | **Indikator** |
| **1** | Isi pengabdian harus mencakup Pengembangan iptek, teknologi tepat guna bagi masyarakat yang harus memuat prinsip-prinsip kemanfaatan, kemutakhiran, dan mengantisipasi kebutuhan masa datang | 1. Penghargaan nasional dan internasional judul/tahun 2. Meningkatnya publikasi, jumlah buku ajar dan modul pelatihan. 3. Jumlah pengabdian yang memuat inovasi dan berguna bagi masyarakat. 4. Kelompok pengabdian dengan teknologi tepat guna 5. Pengabdian sesuai jadwal |

* 1. **Standar Proses Pengabdian Kepada Masyarakat**

## Pengertian dan Ruang Lingkup

Standar proses pengabdian kepada masyarakat merupakan kriteria minimal tentang kegiatan pengabdian kepada masyarakat, yang terdiri atas perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan kegiatan. (2) Kegiatan pengabdian kepada masyarakat dapat berupa:

* + - 1. pelayanan kepada masyarakat;
      2. penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi sesuai dengan bidang keahliannya;
      3. peningkatan kapasitas masyarakat; atau
      4. pemberdayaan masyarakat.

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat wajib mempertimbangkan standar mutu, menjamin keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, serta keamanan pelaksana, masyarakat, dan lingkungan.

## Landasan Ideal

Landasan ideal Standar Pengelolaan Penelitian tercantum dalam Permendikbud Nomor 44 tahun 2015.

## Standar dan Indikator

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **No** | **Standar** Proses  Pengabdian Masyarakat | **Indikator** |
| 1 | Proses pengabdian kepada masyarakat merupakan kriteria minimal tentang kegiatan pengabdian kepada masyarakat, yang terdiri atas perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan kegiatan | 1. Setiap kegiatan PPM harus memiliki proposal yang disetujui pimpinan. 2. Proposal harus lolos penilaian oleh pimpinan atau reviewer. 3. Pelaksanaan PPM harus melibatkan mahasiswa 4. Pelaporan kegiatan dalam bentuk laporan kemajuan dan laporan akhir yang disahkan pimpinan. 5. Dokumen hasil monev kegiatan. 6. Hasil PPM harus dipublikasikan dalam jurnal atau prosiding. |

* 1. **Standar Penilaian Pengabdian Kepada Masyarakat**

## Pengertian dan Ruang Lingkup

Standar penilaian pengabdian kepada masyarakat merupakan kriteria minimal tentang penilaian terhadap proses dan hasil pengabdian kepada masyarakat. Penilaian proses dan hasil pengabdian kepada masyarakat dilakukan secara terintegrasi dengan prinsip penilaian paling sedikit:

1. edukatif, yang merupakan penilaian untuk memotivasi pelaksana agar terus meningkatkan mutu pengabdian kepada masyarakat;
2. objektif, yang merupakan penilaian berdasarkan kriteria penilaian dan bebas dari pengaruh subjektivitas;
3. akuntabel, yang merupakan penilaian yang dilaksanakan dengan kriteria dan prosedur yang jelas dan dipahami oleh pelaksana pengabdian kepada masyarakat; dan
4. transparan, yang merupakan penilaian yang prosedur dan hasil penilaiannya dapat diakses oleh semua pemangku kepentingan.

Penilaian proses dan hasil pengabdian kepada masyarakat selain memenuhi prinsip penilaian harus memperhatikan kesesuaian dengan standar hasil, standar isi, dan standar proses pengabdian kepada masyarakat. Kriteria minimal penilaian hasil pengabdian kepada masyarakat meliputi:

1. tingkat kepuasan masyarakat;
2. terjadinya perubahan sikap, pengetahuan, dan keterampilan pada masyarakat sesuai dengan sasaran program;
3. dapat dimanfaatkannya ilmu pengetahuan dan teknologi di masyarakat secara berkelanjutan;
4. terciptanya pengayaan sumber belajar dan/atau pembelajaran serta pematangan sivitas akademika sebagai hasil pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi; atau
5. teratasinya masalah sosial dan rekomendasi kebijakan yang dapat dimanfaatkan oleh pemangku kepentingan.

Penilaian pengabdian kepada masyarakat dapat dilakukan dengan menggunakan metode dan instrumen yang relevan, akuntabel, dan dapat mewakili ukuran ketercapaian kinerja proses dan pencapaian kinerja hasil pengabdian kepada masyarakat.

## Landasan Ideal

Landasan ideal Standar Pengelolaan Penelitian tercantum dalam Permenristekdikti Nomor 44 tahun 2015.

## Standar dan Indikator

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **No** | **Standar** Penilaian  Pengabdian Masyarakat | **Indikator** |
|  | Penilaian pengabdian kepada masyarakat merupakan kriteria minimal tentang penilaian terhadap proses dan hasil pengabdian kepada masyarakat | 1. Tingkat kepuasan masyarakat; 2. Terjadinya perubahan sikap, pengetahuan, dan keterampilan pada masyarakat sesuai dengan sasaran program; 3. Dapat dimanfaatkannya ilmu pengetahuan dan teknologi di masyarakat secara berkelanjutan; 4. Terciptanya pengayaan sumber belajar   dan/atau pembelajaran serta |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | pematangan sivitas akademika sebagai  hasil pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;  Teratasinya masalah sosial dan rekomendasi kebijakan yang dapat dimanfaatkan oleh pemangku kepentingan. |

* 1. **Standar Pelaksana Pengabdian Kepada Masyarakat**

## Pengertian dan Ruang Lingkup

Standar pelaksana pengabdian kepada masyarakat merupakan kriteria minimal kemampuan pelaksana untuk melaksanakan pengabdian kepada masyarakat. Pelaksana pengabdian kepada masyarakat wajib memiliki penguasaan metodologi penerapan keilmuan yang sesuai dengan bidang keahlian, jenis kegiatan, serta tingkat kerumitan dan kedalaman sasaran kegiatan. Kemampuan pelaksana pengabdian kepada masyarakat ditentukanberdasarkan kualifikasi akademik dan hasil pengabdian kepada masyarakat.

## Landasan Ideal

Landasan ideal Standar Pengelolaan Penelitian tercantum dalam Permenristekdikti Nomor 44 tahun 2015.

* + 1. **Standar dan Indikator**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **No** | **Standar Pelaksana**  **Pengabdian Masyarakat** | **Indikator** |
| 1 | Pelaksana pengabdian kepada masyarakat wajib memiliki kemampuan tingkat penguasaan yang sesuai dengan bidang keahlian, jenis kegiatan, serta tingkat kerumitan dan tingkat kedalaman sasaran kegiatan. | 1. Kemampuan menentukan kewenangan dalam melaksanakan pengabdian. 2. Setiap Dosen harus mengikuti pelatihan metodologi pengabdian agar mampu melaksanakan pengabdian dengan baik. 3. Pelaksana harus memiliki kualifikasi sesuai dengan kriteria yang dipersyaratkan penyandang   dana. |
| 2 | Pelaksana pengabdian kepada masyarakat adalah dosen yang melibatkan  mahasiswa | Pelaksanaan pengabdian masyarakat setidaknya melibatkan satu orang mahasiswa. |

## Standar Sarana dan Prasarana Pengabdian kepada Masyarakat

* + 1. **Pengertian dan Ruang Lingkup**

Standar sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakatmerupakan kriteria minimal sarana dan prasarana yang diperlukan untuk menunjang proses pengabdian kepada masyarakat dalam rangka memenuhi hasil pengabdian kepada masyarakat. Sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat merupakan fasilitas perguruan tinggi yang digunakan untuk memfasilitasi pengabdian kepada masyarakat paling sedikit terkait dengan bidang ilmu program studi yang dikelola perguruan tinggi dan area sasaran kegiatan.

Sarana dan prasarana pengabdian di IAI-MU Tanjungpinang juga dimanfaatkan untuk kegiatan proses pembelajaran dan penelitian. Oleh karena itu, sarana prasarana pengabdian kepada masyarakat harus memenuhi standar mutu keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, keamanan peneliti, masyarakat dan lingkungan.

## Landasan Ideal

Landasan ideal Standar Pengelolaan Penelitian tercantum dalam Permenristekdikti Nomor 44 tahun 2015.

## Standar dan Indikator

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **No** | **Standar Sarana dan**  **Prasarana PPM** | **Indikator** |
|  | Tersedianya sarana dan | Harus memenuhi standar mutu, keselamatan |
| prasarana pengabdian | kerja, kesehatan, kenyamanan, dan |
| kepada masyarakat yang | keamanan. |
| diperlukan untuk |  |
| menunjang proses |  |
| pengabdian kepada |  |
| masyarakat dalam rangka |  |
| memenuhi hasil pengabdian |  |
| kepada masyarakat |  |

* 1. **Standar Pengelolaan Pengabdian kepada Masyarakat**

## Pengertian dan Ruang Lingkup

Standar pengelolaan pengabdian kepada masyarakat merupakan kriteria minimal tentang perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan pengabdian kepada masyarakat. Pengelolaan pengabdian kepada masyarakat dilaksanakan oleh unit kerja dalam bentuk kelembagaan yang bertugas untuk mengelola pengabdian kepada masyarakat. Kelembagaan pengelola pengabdian kepada masyarakat sebagaimana dimaksud

pada ayat (2) adalah lembaga pengabdian kepada masyarakat, lembaga penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, atau bentuk lainnya yang sejenis sesuai dengan kebutuhan dan ketentuan perguruan tinggi.

Sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan fasilitas perguruan tinggi yang digunakan untuk: a. memfasilitasi pengabdian kepada masyarakat paling sedikit yang terkait dengan penerapan bidang ilmu dari program studi yang dikelola perguruan tinggi dan area sasaran kegiatan; b. proses pembelajaran; dan c. kegiatan pengabdian.

## Landasan Ideal

Landasan ideal Standar Pengelolaan Penelitian tercantum dalam Permenristekdikti Nomor 44 tahun 2015.

* + 1. **Standar dan Indikator**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **No** | **Standar Pengelolaan**  **Pengabdian Masyarakat** | **Indikator** |
|  | Pengelolaan pengabdian kepada masyarakat merupakan kriteria minimal tentang perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan pengabdian kepada masyarakat. | 1. IAI-MU memiliki rencana strategis pengabdian kepada masyarakat yang merupakan bagian   dari rencana strategis perguruan tinggi;   1. Menyusun kriteria dan prosedur penilaian pengabdian kepada masyarakat 2. Menjaga dan meningkatkan mutu pengelolaan lembaga secara berkelanjutan; 3. Melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap lembaga atau fungsi pengabdian kepada masyarakat. 4. Memiliki panduan tentang kriteria pelaksana pengabdian kepada masyarakat dengan mengacu pada standar hasil, standar isi, dan standar proses pengabdian kepada masyarakat; 5. Mendayagunakan sarana dan prasarana pada lembaga lain melalui kerja sama pengabdian kepada masyarakat; 6. Melakukan analisis kebutuhan yang menyangkut jumlah, jenis, dan   spesifikasi sarana dan prasarana |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **No** | **Standar Pengelolaan**  **Pengabdian Masyarakat** | **Indikator** |
|  |  | pengabdian kepada masyarakat; 8 Menyampaikan laporan kinerja lembaga atau fungsi pengabdian  kepada masyarakat dalam menyelenggarakan program pengabdian kepada masyarakat paling sedikit melalui pangkalan data  pendidikan tinggi. |

## Standar Pendanaan dan Pembiayaan Pengabdian kepada Masyarakat

* + 1. **Pengertian dan Ruang Lingkup**

Standar pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat merupakan kriteria minimal sumber dan mekanisme pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat. Perguruan tinggi wajib menyediakan dana internal untuk pengabdian kepada masyarakat. Selain dari dana internal perguruan tinggi, pendanaan pengabdian kepada masyarakat dapat bersumber dari pemerintah, kerja sama dengan lembaga lain, baik di dalam maupun di luar negeri, atau dana dari masyarakat. Pendanaan pengabdian kepada masyarakat bagi dosen atau instruktur digunakan untuk membiayai:

1. Perencanaan pengabdian kepada masyarakat;
2. Pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat;
3. Pengendalian pengabdian kepada masyarakat;
4. Pemantauan dan evaluasi pengabdian kepada masyarakat;
5. Pelaporan pengabdian kepada masyarakat; dan
6. Diseminasi hasil pengabdian kepada masyarakat.

Mekanisme pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat diatur berdasarkan ketentuan di perguruan tinggi. Perguruan tinggi wajib menyediakan dana pengelolaan pengabdian kepada masyarakat. Dana pengelolaan pengabdian kepada masyarakat digunakan untuk membiayai manajemen pengabdian kepada masyarakat yang terdiri atas seleksi proposal, pemantauan dan evaluasi, pelaporan, dan diseminasi hasil pengabdian kepada masyarakat; serta peningkatan kapasitas pelaksana

## Landasan Ideal

Landasan ideal Standar Pengelolaan Penelitian tercantum dalam Permenristekdikti Nomor 44 tahun 2015

* + 1. **Standar dan Indikator**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **No** | **Standar Pendanaan dan Pembiayaan PPM** | **Indikator** |
| 1 | Pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat merupakan kriteria minimal sumber dan mekanisme pendanaan dan pembiayaan pengabdian  kepada masyarakat | 1. IAI-MU wajib menyediakan   dana internal untuk pengabdian kepada masyarakat   1. Selain dari dana internal perguruan tinggi, pendanaan pengabdian kepada masyarakat dapat bersumber dari pemerintah, kerja sama dengan lembaga lain, baik di dalam maupun di luar negeri, atau dana dari masyarakat minimal 5%. |

# BAB VI

**STANDAR MAHASISWA DAN PENGELOLAAN ALUMNI**

* 1. **Pengertian dan Ruang Lingkup**

Di dalam UU nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, mahasiswa adalah peserta didik pada jenjang Pendidikan Tinggi. Mahasiswa merupakan bagian generasi muda bangsa yang membutuhkan pengembangan fisik, potensi, kepribadian, dan karakter sebagai calon sumber daya manusia produktif atau pemimpin yang berkualitas di masa datang.

Sebagai peserta didik, mahasiswa memerlukan bimbingan selama proses pendidikan sesuai dengan yang diamanatkan oleh tujuan pendidikan nasional. Pembimbingan kemahasiswaan pada dasarnya merupakan pembimbingan pembelajaran agar potensi yang dimiliki oleh mahasiswa dapat berkembang maksimal untuk membentuk kompetensi yang berguna dalam kehidupannya.

Alumni adalah lulusan dari program studi yang bergabung di bawah ikatan alumni IAI-MU Tanjungpinang (IKA IAI-MU Tanjungpinang )

## Landasan Ideal

Landasan ideal tentang mahasiswa termaktum pada pasal 13 UU no 12 tahun 2012, yaitu:

* + 1. Mahasiswa sebagai anggota Sivitas Akademika diposisikan sebagai insan dewasa yang memiliki kesadaran sendiri dalam mengembangkan potensi diri di Perguruan Tinggi untuk menjadi intelektual, ilmuwan, praktisi, dan/atau professional;
    2. Mahasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara aktif mengembangkan potensinya dengan melakukan pembelajaran, pencarian kebenaran ilmiah, dan/atau penguasaan, pengembangan, dan pengamalan suatu cabang Ilmu Pengetahuan dan/atau Teknologi untuk menjadiilmuwan, intelektual, praktisi, dan/atau profesional yang berbudaya;
    3. Mahasiswa memiliki kebebasan akademik dengan mengutamakanpenalaran dan akhlak mulia serta bertanggung jawab sesuai dengan budayaakademik;
    4. Mahasiswa berhak mendapatkan layanan Pendidikan sesuai dengan bakat, minat, potensi, dan kemampuannya;
    5. Mahasiswa dapat menyelesaikan program Pendidikan sesuai dengan kecepatan belajar masing-masing dan tidak melebihi ketentuan batas waktu yang ditetapkan oleh Perguruan Tinggi;
    6. Mahasiswa berkewajiban menjaga etika dan menaati norma Pendidikan Tinggi untuk menjamin terlaksananya Tridharma dan pengembangan budaya akademik;

Selanjutnya pada pasal 14 dinyatakan bahwa:

1. Mahasiswa mengembangkan bakat, minat, dan kemampuan dirinyamelalui kegiatan kokurikuler dan ekstrakurikuler sebagai bagian dari proses Pendidikan;
2. Kegiatan kokurikuler dan ekstrakurikuler sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) dapat dilaksanakan melalui organisasi kemahasiswaan;

1. Ketentuan lain mengenai kegiatan kokurikuler dan ekstrakurikuler sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam statuta Perguruan Tinggi.

## Standar Mutu dan Indikator

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| No | Standar Mahasiswa dan  Pengelolaan Alumni | Indikator |
| 1 | Mahasiswa sebagai input | 1. Lulus seleksi masuk (1:6 ) 2. Terdaftar sebagai mahasiswa |
| 2 | Penilaian | 1. Tersedia dokumen kebijakan penilaian mahasiswa 2. Sistem penilaian terstruktur dan terjadwal 3. Hasil penilaian proses pembelajaran digunakan sebagai umpan balik 4. Nilai akhir diumumkan di SIAKAD |
| 3 | Dukungan terhadap mahasiswa | 1. Adanya kemudahan informasi bagi mahasiswa 2. Tersedia pembimbing akademik dan non akademik bagi mahasiswa 3. Tersedia program unggulan dan beasiswa 4. Tersedia unit pelayanan mahasiswa dengan fasilitasnya 5. Tersedia fasilitas bagi mahasiswa berbakat dan berprestasi Tersedia bimbingan konseling bagi mahasiswa 6. Tersedia fasilitas klinik kesehatan untuk   mahasiswa |
| 4 | Kinerja mahasiswa | 1. Ketentuan tentang masa studi mahasiswa terdapat dalam buku pedoman 2. Peringkat mutu mahasiswa sesuai dengan   peraturan pedidikan |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| No | Standar Mahasiswa dan  Pengelolaan Alumni | Indikator |
|  |  | 3. IPK dan kriterianya tercantum dalam  buku pedoman |
| 5 | Program kegiatan ilmiah mahasiswa | 1. Organisasi kemahasiswaan yang berbasis kegiatan ilmiah difasilitasi oleh Institut 2. Ada kompetisi ilmiah yang rutin di tingkat Institut, fakultas, dan prodi untuk seleksi mengikuti kegiatan nasional dan   internasional |
| 6 | Program kegiatan *softskill* mahasiswa meliputi: seni, olah raga, kreativitas dan kepemimpinan | 1. Organisasi kemahasiswaan yang berbasis seni, olah raga, kreativitas dan kepemimpinan difasilitasi oleh Institut 2. Ada kompetisi seni, olah raga, kreativitas dan kepemimpinan yang rutin di tingkat Institut, fakultas, dan prodi untuk seleksi mengikuti kegiatan nasional dan internasional 3. Tersedia pembinaan *softskill* mahasiswa (seni, olah raga, kreativitas dan kepemimpinan) yang terorganisir dalam bentuk pelatihan 4. Tersedia *reward* bagi mahasiswa berprestasi di bidang seni, olah raga,   kreativitas dan kepemimpinan |
| *7* | *Tracer study* alumni | 1. Ada unit khusus di tingkat Institut yang 2. menyelenggarakan *tracer study* sebagai sistem yang terintegrasi di level Institut 3. Ada anggaran rutin untuk melakukan   *tracer study*   1. Jumlah unit yang memanfaatkan data dan informasi dari *tracer study* terdokumentasi |
| 8 | Ikatan alumni IAI/ prodi | 1. Ada bentuk kerjasama antara Institutusi /prodi dengan ikatan alumni 2. Ada penggalangan dana (dana abadi) melalui usaha bersama alumni dengan   almamater |
| 9 | Peluang kerja alumni baru | 1. Ada Pusat Karir di tingkat Institusi 2. Ada bentuk kerjasama formal dengan dunia kerja |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| No | Standar Mahasiswa dan  Pengelolaan Alumni | Indikator |
|  |  | 1. Ada dokumentasi mengenai keberhasilan Pusat Karir dalam membantu alumni baru mencari kerja 2. Ada program peningkatan *softskill* bagi   alumni baru |

# BAB VII STANDAR PENGELOLAAN

* 1. **Pengertian dan Ruang Lingkup**

Pengelolaan satuan pendidikan pada jenjang pendidikan tinggi menerapkan otonomi perguruan tinggi yang dalam batas-batas yang diatur dalam ketentuan perundang-undangan yang berlaku, memberikan kebebasan dan mendorong kemandirian dalam pengelolaan akademik, operasional, personalia, keuangan dan area fungsional kepengelolaan lainnya yang diatur oleh masing- masing perguruan tinggi.

Setiap satuan pendidikan dikelola atas dasar rencana kerja tahunan yang merupakan penjabaran rinci dari rencana kerja jangka menengah satuan pendidikan yang meliputi masa 4 tahun. Pengaturan pelaksanaan pengelolaan satuan pendidikan yang tidak sesuai dengan RKAT haruslah mendapat persetujuan dari lembaga yang berwenang sebagaimana diatur melalui SK ketua yang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Dalam perencanaan target kinerja, perencanaan kegiatan/ kerja dan perencanaan/ alokasi dan pengelolaan dana harus melibatkan program studi. Keterlibatan aktif program studi harus tercerminkan dengan bukti tertulis tentang proses perencanaan, pengelolaan dan pelaporan serta pertanggung- jawaban penggunaan dana kepada pemangku kepentingan melalui mekanisme yang transparan dan akuntabel. Semua prodinya memiliki perencanaan sasaran mutu, perencanaan kegiatan/ kerja dan perencanaan/ alokasi dan pengelolaan dana sesuai prosedur/mekanisme yang berlaku di IAI-MU Tanjungpinang dan terdokumentasi secara baik dan tertelusur.

## Landasan Ideal

Pengelolaan Perguruan Tinggi yang diatur dalam Pasal 62 UU no 12 tahun 2012 tentang Pendidikan tinggi menyatakan bahwa: (1) Perguruan Tinggi memiliki otonomi untuk mengelola sendiri lembaganya sebagai pusat penyelenggaraan Tridharma, (2) Otonomi pengelolaan Perguruan Tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan dasar dan tujuan serta kemampuan Perguruan Tinggi, (3) Dasar dan tujuan serta kemampuan Perguruan Tinggi untuk melaksanakan otonomi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dievaluasi secara mandiri oleh Perguruan Tinggi, (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai evaluasi dasar dan tujuan serta kemampuan Perguruan Tinggi untuk melaksanakan otonomi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dalam Peraturan Menteri.

## Standar Mutu dan Indikator

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **No** | **Standar Pengelolaan PT** | **Indikator** |
| 1 | Struktur organisasi di level Institusi, Jurusan/Prodi | Tersedia SK ketua untuk setiap unit organisasi. |
| 2 | Pedoman yang mengatur pelaksanaan pengelolaan pendidikan (kurikulum, kalender akademik, tugas dan pembagian tugas tenaga pendidik dan kependidikan) | Tersedia pedoman yang lengkap untuk setiap pengelolaan pendidikan yang memiliki SK ketua |
| 3 | Kode etik sivitas akademik | Tersedia pedoman yang mengatur etika akademik yang memiliki SK ketua |
| 4 | Biaya operasional satuan pendidikan | Tersedia SK ketua tentang Biaya Operasional Pendidikan (BOP) untuk setiap jenjang pendidikan di IAI-MU  yang mudah diakses oleh calon peserta didik. |
| 5 | Rencana kerja menengah dan rencana kerja tahunan | Tersedia Renstra dan RKAT di setiap unit kerja |
| 6 | Pengelolaan satuan pendidikan yang mandiri, efisien, efektif dan akuntabel | 1. Setiap unit kerja melakukan evaluasi internal secara periodik 2. Memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) sebagai media pengelolaan |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **No** | **Standar Pengelolaan PT** | **Indikator** |
| 7 | Pengaturan kegiatan yang tidak tercantum dalam RKAT | Pelaksanaan kegiatan yang sangat penting dan harus dilaksanakan yang tidak sesuai dengan RKAT merupakan kebijakan Pimpinan |
| 8 | Pertanggungjawaban pelaksanaan pegelolaan pendidikan di IAI-MU | Tersedia laporan yang memuat capaian kinerja IAI-MU setiap tahun dan dipertanggungjawabkan pada sidang  senat IAI-MU |
| 9 | Pengawasan satuan pendidikan (pemantauan, supervise, evaluasi, laporan dan tindak  lanjut hasil pengawasan) | Tersedia laporan pengawasan dan ada tindak lanjut hasil pengawasan |
| 10 | Supervisi manajerial dan akademik | 1. Dilakukan secara tratur dan berkesinambungan oleh petugas pelaksana yang ditetapkan oleh pimpinan Institusi 2. Tersedia sistem supervisi manajemen dan akademik 3. Tersedia laporan hasil supervisi oleh pimpinan IAI-MU /prodi   atau unit kerja lainnya |
| 11 | Pelaporan oleh pendidik, tenaga kependidikan, pimpinan satuan pendidikan | 1. Tersedia format laporan sesuai lingkup tugas masing-masing 2. Tersedia laporan sesuai lingkup tugas   masing-masing |

# BAB VIII

**STANDAR SISTEM INFORMASI**

* 1. **Pengertian dan Ruang Lingkup**

Perguruan tinggi wajib memiliki sistem informasi yang dapat dimanfaatkan untuk komunikasi internal dan eksternal kampus serta akses bagi mahasiswa dan dosen terhadap sumber- sumber informasi ilmiah. Sistem informasi yang dimiliki berupa basis data dan informasi yang minimal mencakup keuangan, asset, sarana dan prasarana, administrasi akademik, profilmahasiswa dan lulusan, tenaga pendidik dan kependidikan (SDM).

## Landasan Ideal

Pasal 56 ayat 4 UU No. 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi menyatakan bahwa penyelenggara Perguruan Tinggi wajib menyampaikan data dan informasi penyelenggaraan Perguruan Tinggi serta memastikan kebenaran dan ketepatannya. Dalam Permenristekdikti Nomor 44 tahun 2015 pasal 39 butir (f) dan pasal 51 butir (h), pasal 62 butir (h) data dan informasi terebut secara berkala disampaikan kepada Pangkalan Data Perguruan Tinggi (PD- DIKTI) yang dikelola oleh Kemendiknas.

## Standar Mutu dan Indikator

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **No** | **Standar Sistem Informasi** | **Indikator** |
|  | Kepemilikan blue print tentang pengembangan, pengelolaan, dan pemanfaatan sistem informasi yang lengkap dan perangkat  pendukungnya | 1. Ada bukti tentang kepemilikan *blue print* yang jelas tentang pengembangan, pengelolaan, dan pemanfaatan sistem informasi 2. Memiliki sarana dan prasarana pendukung sistem informasi yang memadai 3. Ada unit pengelola di tingkat Institut, fakultas dan jurusan/prodi 4. Memiliki sistem aliran data dan   otoritas akses data. |
|  | Kepemilikan sistem pendukung pengambilan keputusan yang  efektif dan obyektif | Proses pengambilan keputusan melalui pengolahan informasi past experiences, mensimulasi, dan mengevaluasi alternatif keputusan yang akan diambil sehingga  efektif dan obyektif |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **No** | **Standar Sistem Informasi** | **Indikator** |
|  | Memiliki SIM keuangan, asset, administrasi akademik, profil mahasiswa dan lulusan, SDM | Adanya basis dan informasi yang terdapat dalam system informasi IAI-MU  yang mencakup: administrasi akademik, profil mahasiswa dan lulusan, SDM, asset (sarana dan prasarana), keuangan, dan  sistem pembelajaran |
|  | Memiliki sistem informasi yang dimanfaatkan untuk komunikasi internal dan eksternal kampus serta akses bagi mahasiswa dan dosen terhadap sumber-sumber  informasi ilmiah | Sistem informasi yang dikembangkan telah dimanfaatkan untuk komunikasi internal dan eksternal kampus serta akses bagi mahasiswa dan dosen terhadap sumber informasi ilmiah minimal meliputi: website IAI-MU |
|  | Memiliki kapasitas bandwidth per mahasiswa | Memiliki kapasitas bandwidth per mahasiswa yang ditetapkan melalui Surat  Keputusan Ketua |
|  | Memiliki sistem perekaman data secara efisien dan efektif. | Ada bukti tentang sistem perekaman data dan dan informasi yang efisien dan informasi yang mudah dilacak dan digunakan secara efektif dan efisien untuk memberikan peringatan dini agar segera dilakukan tindakan perbaikan |

# BAB IX PENUTUP

Pendidikan tinggi memiliki posisi yang sangat strategis dalam rangka menghasilkan sumber daya manusia yang berkualitas. Hal ini sejalan dengan tujuan pendidikan tinggi yakni menyiapkan peserta didik menjadi anggota masyarakat yang memiliki kemampuan akademik dan/atau profesional yang dapat menerapkan, mengembangkan dan atau memperkaya khasanah ilmu pengetahuan, teknologi dan/atau kesenian. Sumber daya manusia (SDM) di lingkungan perguruan tinggi yang terdiri dari dosen dan tenaga kependidikan mempunyai posisi yang sangat strategis, karena memiliki pengaruh langsung terhadap proses belajar, mutu lulusan dan pola keluaran yang kompetitif.

Dalam melakukan penjaminan mutu, visi selalu menjadi acuan. Visi prodi dan fakultas harus disusun mengacu pada visi IAI-MU Tanjungpinang. Selain visi, kebutuhan *stakeholder* selalu menjadi acuan penjaminan mutu, terutama tentang kualitas lulusan agar memenuhi kompetensi yang diperlukan oleh pengguna lulusan. *Stakeholder* dapat mencakup berbagai komponen, antara lain sektor produktif, masyarakat luas, pemerintah, dan masyarakat perguruan tinggi itu sendiri. Khusus dalam konteks penugasan kepada dosen dan tenaga kependidikan (SDM), relevansi kompetensi lulusan dengan kebutuhan *stakeholders* sangat signifikan. Kompetensi relevan yang dibutuhkan *stakeholders* dipengaruhi oleh penugasan kepada dosen dan tenagakependidikan. Di masa depan, kelulusan bukan semata-mata merupakan peristiwa pencapaian jumlah sks dan indeks prestasi, melainkan lebih dari itu yaitu pemenuhan mutu kompetensi yang dibutuhkan *stakeholders.*

Dalam menjalankan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI), IAI- MU Tanjungpinang menyusun empat buah buku dokumen penjaminan mutu, yaitu Dokumen Kebijakan Mutu (KM), Standar Mutu (SM), Manual Mutu (MM), Standar Operasional Prosedur (SOP), dan Dokumen Formulir. LPMP2M harus mampu mendorong implementasi penjaminan mutu sehingga berjalan di seluruh unit kerja yang mencakup siklus perencanaan, pelaksanaan, analisis danevaluasi, tindakan perbaikan yang dibuktikan dalam bentuk laporan monev dan audit.

Monitoring dan evaluasi penjaminan mutu dilakukan terhadap 28 standar yang tertulis dalam buku ini. IAI-MU Tanjungpinang memiliki komitmen untuk menyediakan dana yang menjamin upaya peningkatan mutu internal serta akreditasi secara terus menerus sehingga keinginan menjadikan IAI-MU Tanjungpinang menjadi Institut dapat terwujud.